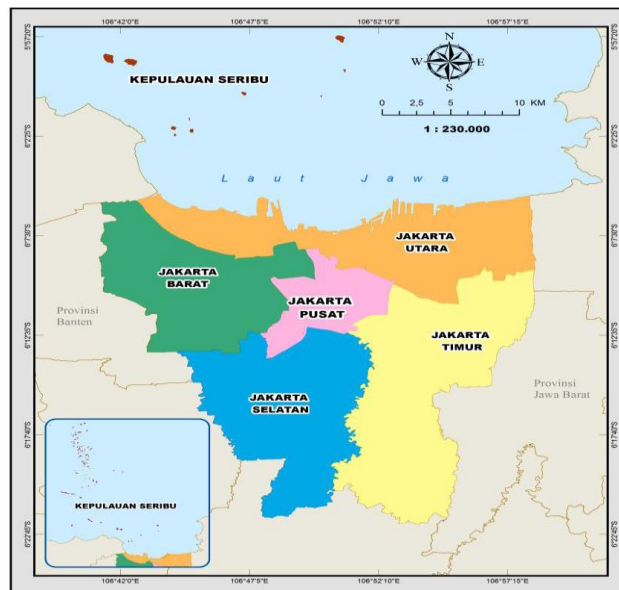


BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Tentang Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang ada di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. DKI Jakarta juga dipilih menjadi ibukota negara, pusat pemerintahan dan sekaligus pusat bisnis dan ekonomi. Dengan demikian, kondisi ini menjadikan DKI Jakarta sebagai kawasan metropolitan Indonesia. Selain itu, sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan, hal ini menjadikan Jakarta sebagai *center of gravity* Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pertahanan terhadap DKI Jakarta harus mendapatkan pengawalan yang ekstra demi menjaga kestabilan dan keamanan nasional negara.



Gambar 4.1 Peta DKI Jakarta (sumber: jakarta.bps.go.id)

Secara astronomis Provinsi DKI Jakarta terletak antara $6^{\circ} 12'$ Lintang Selatan dan $106^{\circ} 48'$ Bujur Timur. Topografi wilayah Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebelah utara Jakarta membentang pantai sepanjang 35 km, yang menjadi muara bagi 13 buah sungai dan 2 buah kanal. Di sebelah selatan dan timur Jakarta berbatasan dengan Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kabupaten

Bekasi, sebelah barat dengan Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta di sebelah utara dengan Laut Jawa¹.

Luas wilayah DKI Jakarta adalah seluas 662,33 km² daratan dan 6.977,5 km² lautan². Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta tersebut terbagi lagi menjadi lima wilayah Kota administrasi dan satu Kabupaten administratif, yakni: Kota administrasi Jakarta Pusat dengan luas 48,13 km², Jakarta Utara dengan luas 146,66 km², Jakarta Barat dengan luas 129,54 km², Jakarta Selatan dengan luas 141,27 km², dan Kota administrasi Jakarta Timur dengan luas 187,73 km², serta Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu dengan luas 8,7 km². Bentangan luas wilayah DKI Jakarta, dari 5 kota administrasi dan 1 kabupaten administratif, tercatat provinsi DKI Jakarta secara administratif memiliki 267 Kelurahan/desa dan 44 Kecamatan³.

Secara keadaan geografis, DKI Jakarta terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 7 mdpl. Selain dataran rendah, Jakarta pun memiliki sungai dan atau kanal sebanyak 17 buah sebagai sumber air di Jakarta. Kondisi geografisi ini secara merata dan semakin melandai dari wilayah selatan ke wilayah bagian utara. Jakarta dengan kondisi geografis lautan yang lebih luas dari daratan memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar, yakni berupa sumber daya mineral dan hasil laut.

Selain itu, dari kondisi iklim dan cuaca, keadaan DKI Jakarta umumnya beriklim panas dengan suhu udara maksimum berkisar 32,7°C – 35,2°C pada siang hari, dan suhu udara minimum berkisar 23,0°C - 25,4°C pada malam hari. Temperatur Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 tertinggi di bulan Juni (35,2° C) dan terendah di bulan Oktober (23,0 °C), dengan kelembaban 35 sampai 97 persen. Curah hujan tertinggi di bulan Februari (520,28 mm²) dan terendah di bulan Agustus (0,8 mm²).

Menurut data dari data.jakarta.go.id tahun 2016, menunjukkan penduduk DKI Jakarta berdasarkan agama, dengan rincian: Islam (8,6 Juta), Kristen 888,8

¹ Perda No 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007-2012

² Surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No 171 Tahun 2007

³ DKI Jakarta dalam angka tahun 2018. BPS DKI Jakarta

ribu, Katolik 411,7 ribu, Budha 385,9 ribu, Hindu 19,4ribu, Konghucu 1.200, Aliran kepercayaan 226 jiwa.⁴

4.1.1.1 Kondisi Demografi dan Sosial Budaya Provinsi DKI Jakarta

Dalam sejarahnya, perkembangan yang terjadi di Jakarta sangat erat dengan perkembangan sejarah bangsa Indonesia di masa silam. Bahkan, Jakarta menjadi saksi utama sejarah prarevolusi sampai revolusi kemerdekaan Indonesia. Potensi material dan non material membuat Jakarta menjadi zona terjadinya banyak konflik dalam sejarah. Sebut saja, Jakarta mengalami banyak perubahan nama sejak zaman kerajaan hindu budha sampai kemerdekaan. Sebut saja, Sunda kelapa, batavia sampai akhirnya jayakarta yang kemudian diadopsi menjadi Jakarta hingga hari ini.

Gambaran bentuk dan struktur Jakarta pada periode 1961-1970 secara rinci dijelaskan Rifai bahwa daerah pusat usaha di Jakarta ada enam wilayah, yaitu: Glodok, Gambir, Jatinegara, Senen, Tanjung Priok, Koja dan Blok M (Fazriah, 2006).⁵ Permukiman penduduk pun bergerak ke arah selatan dan tahun 1975 bertambah ke arah barat dan timur Jakarta. Akhirnya wilayah pinggiran selatan seperti cibubur, cilandak, sampai jagakarsa beralih fungsi lahan, khususnya untuk pemukiman. Kemudian kawasan Sunter, Kelapa Gading, Kedoya, Joglo, Cengkareng, Kalideres dan Cakung berubah menjadi kawasan pemukiman kelas menengah atas yang dibangun pihak swasta. Bahkan semakin menjamur sampai ke wilayah pinggiran seperti Bintaro, Serpong, Depok hingga Bekasi.

Perkembangan pesat hingga hari ini pantas membuat Jakarta, menjadi kawasan metropolis di Indonesia. Perkembangan ini dipengaruhi tidak hanya kekuatan internal Jakarta sendiri, namun juga kekuatan regional maupun Internasional. Tak heran, akibatnya Jakarta menjadi tujuan urbanisasi dari masyarakat seluruh penjuru Indonesia. Kegiatan urbanisasi di Jakarta ini membuat penduduk di Jakarta selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya.

⁴ Beritagar.id. "Populasi Penduduk DKI Jakarta Berdasarkan Agama". tersedia di: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/populasi-penduduk-dki-jakarta-berdasarkan-agama-1520252043> (diakses pada oktober 2018)

⁵ Fazriah, Siti. 2006. Wilayah Konflik di DKI Jakarta. Depok. Skripsi. Universitas Indonesia, hal. 23

Tercatat menurut sensus penduduk tahun 2010 bahwa penduduk provinsi DKI Jakarta didominasi oleh suku Jawa (3,453 juta jiwa), Betawi (2,7 juta jiwa), Sunda (1,395 juta jiwa), Tionghoa (632 ribu jiwa) dan Batak (327 ribu). Adapun etnis lainnya antara lain: Minang, Melayu, Madura, Palembang, Bugis, Maluku, Papua dan lain-lain.⁶

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 tercatat berdasarkan proyeksi penduduk hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah berjumlah 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.94 persen. Sementara itu, memperhatikan jumlah penduduk pada tahun 2017 dan dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, maka diketahui tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2017 mencapai 15.663 per 1 km², dengan Jakarta Barat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi dengan 19.516 jiwa/ km² dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah dengan kepadatan terendah dengan 2.747 jiwa/ km².

Jumlah pencari kerja pada tahun 2017 sebesar 29.548 orang. Sementara pekerja yang sudah ditempatkan sebanyak 25.121 orang. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 3.355.750 mengalami kenaikan sebesar 8.25 persen bila dibandingkan tahun 2016. Tingkat pengangguran di DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 7.14 persen sementara tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 61.97 persen.⁷

Secara umum indikator demografi Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Demografi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

No	Indikator	2017
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	10.374.200
2	Laju pertumbuhan penduduk (%)	1,10
3	Jumlah pengangguran terbuka (org)	346.945
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,14

⁶ BPS Republik Indonesia. "Kewarganegaraan penduduk Indonesia". Terdapat di: <http://Sp2010.bps.go.id/files/ebook/kewarganegaraan%20penduduk%indonesia/index.html> (diakses pada oktober 2018)

⁷ BPS DKI Jakarta. 2018. DKI Jakarta dalam angka.

5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	61,97
---	--	-------

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 dan Survei Angkatan Kerja Nasional DKI Jakarta, Agustus 2017

Penduduk angkatan kerja berdasarkan usia jumlah penduduk DKI Jakarta mayoritas diisi oleh masyarakat berusia 25 – 39 tahun dengan jumlah 2.995.787 jiwa. Ironisnya, dari jumlah penduduk berdasarkan angkatan kerja (> 15 tahun) berdasarkan pendidikan tertingginya paling banyak adalah sekolah menengah atas/ sederajat sejumlah 2.152.468 jiwa.

Selain itu, dari jumlah angkatan kerja yang ada di Jakarta, didominasi oleh penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai sejumlah 3.079.173 jiwa. Adapun bidang usaha paling banyak bidang kerja yang dilakukan oleh penduduk DKI Jakarta adalah golongan enam (perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel) dan golongan sembilan (jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan).

Jumlah penduduk kerja berdasarkan angkatan kerja sejumlah 7.093.537 jiwa, dari jumlah angkatan kerja sejumlah 7.795.714 jiwa. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Menurut data disnakertrans tahun 2017, jumlah pencari kerja yang terdata adalah sejumlah 58.206 jiwa. sedangkan jumlah lowongan yang terdata pada 2017 adalah sejumlah 37 030 lowongan. Sedangkan UMP DKI Jakarta tahun 2017 adalah sejumlah Rp. 3.355.750 terdapat kenaikan dari tahun 2016 yang berjumlah Rp. 3.100.000 Bahkan terbaru UMP DKI Jakarta untuk 2019 adalah Rp. 3.940.973,096.

Kondisi tingkat kriminalitas DKI Jakarta dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat kepadatannya, juga tingkat penduduk miskin dan tidak sekolah. Tercatat pada tahun 2017 terjadi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 8647 kasus kejahatan, dengan rincian wilayah tingkat kriminalitas terbanyak Jakarta Barat (1990 kasus), Jakarta Selatan (1858 kasus), Jakarta Pusat (1621 kasus), Jakarta Utara (1564 kasus), Jakarta Timur (1561 kasus), dan Kepulauan Seribu (53 kasus). Kriminalitas yang terjadi berkorelasi dengan kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi dan jumlah pengangguran masyarakat suatu daerah.

Maka tidak heran apabila kerawanan kriminalitas yang terhimpun berdasarkan wilayah tidak jauh berbeda hasilnya dalam faktor lainnya. Hal ini menjadi penting untuk diperhatikan sebagai potensi konflik yang dapat timbul pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Mengenai struktur kota DKI Jakarta, Siti Fazriah (2006) menuliskan struktur kota DKI Jakarta berdasarkan penelitian Fauziah, bahwa struktur kota Jakarta terdiri dari: a) Zona inti kota, (kecamatan kebayoran baru, setiabudhi, tanah abang dan senen); b) Zona peralihan, (kecamatan kebayoran lama, mampang prapatan, Pancoran, krmaat jati, Jatinegara, Menteng, Cempaka Putih, kemayoran, Sawah Besar, Gambir, Kebon jeruk, Grogol, Petamburan, Tambora, Taman Sari, dan Tanjung Priok); c) Zona pinggiran, meliputi kecamatan di luar kedua zona tersebut.⁸

4.1.1.2 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

Indikator yang biasa digunakan dalam mengukur taraf kesejahteraan rakyat di suatu wilayah adalah jumlah penduduk miskin dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dua indikator ini dapat menggambarkan potret kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Potret itu berupa penduduk miskin yang ada di wilayah tersebut sampai raihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Selain itu, nilai gini rasio juga digunakan untuk melihat sejauh mana gambaran ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah menurut indikator hitungan statistik. Gini rasio berada dalam rentang nilai 0 hingga 1, apabila semakin mendekati 1, artinya ketimpangannya semakin besar. Sedangkan nilai 0 menunjukkan ada pemerataan. Nilai gini rasio DKI Jakarta pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,41 poin. Angka ini terus meningkat sejak 2007. Gini rasio Provinsi DKI Jakarta ini terbilang tinggi melampaui rata-rata nasional yaitu sebesar 0,393 poin.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin selama periode 2015-2018 secara rata-rata mencapai 9,03% dari jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta, dimana pada tahun 2015 adalah 368.670 jiwa (3,61%), kemudian meningkat menjadi 385.840 jiwa (3,75%) pada tahun 2016 dan bertambah kembali pada tahun 2017 menjadi 393.130 jiwa

⁸ Fazriah, Siti. 2006. Wilayah Konflik di DKI Jakarta. Depok. Skripsi. Universitas Indonesia

(3,78%) dari 10.374.200 jiwa jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2017. Adapun Indikator kemiskinan lainnya yaitu indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di DKI Jakarta pada tahun 2017 masing-masing sebesar 0,52 persen dan 0,10 persen.

Sementara itu, kondisi taraf kesejahteraan rakyat Provinsi DKI Jakarta yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kecenderungan peningkatan gradual setiap tahun, yaitu semula angka IPM pada tahun 2015 adalah 78.99 poin, kemudian naik menjadi 79.60 poin pada tahun 2016, dan 80.06 poin pada tahun 2017. Jika dihitung laju kenaikannya maka selama tiga tahun, yaitu selama periode 2015-2017 rata-rata kenaikannya adalah 0.54 poin per tahun, atau rata2 peningkatan 0.69 persen/tahun sejak 2010-2017.

IPM berdasarkan wilayah di DKI Jakarta, didapat bahwa wilayah paling tinggi IPM nya tahun 2017 sampai paling rendah yaitu, Jakarta selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.⁹ Melihat capaian pembangunan manusia DKI Jakarta yang sangat tinggi, menandakan DKI Jakarta sebagai wilayah yang sangat baik dalam pengembangan pembangunan manusia.

Ditambah dengan amanat pembangunan dunia melalui SDGs (*sustainable development goals*) mengenai *gender equality*, DKI Jakarta merespon itu dengan baik. Hal itu ditandai dengan Indeks Pembangunan Gender, pada tahun 2017, DKI Jakarta meraih 94,70 poin, sedangkan indeks pemberdayaan gender DKI Jakarta tahun 2017, diperoleh 72,34 poin. Dengan rincian, sumbangan pendapatan perempuan sebesar 37,74%, perempuan sebagai tenaga profesional 43,52%, dan keterlibatan perempuan dalam parlemen sebesar 18,87%¹⁰.

Secara lebih rinci, data indikator kesejahteraan rakyat DKI Jakarta tahun 2015 – 2017 dapat dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 4.2 Taraf Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Tahun 2015-2017

No	Indikator	2015	2016	2017
1	Indeks Pembangunan	78,99	79,60	80,06

⁹ BPS Republik Indonesia. "Data DKI Jakarta 2017 (Metode Baru)". Tersedia di: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/3100> (Diakses pada oktober 2018)

¹⁰ DKI Jakarta dalam Angka 2018

No	Indikator	2015	2016	2017
	Manusia (IPM-Komposit)			
Komponen IPM terdiri dari;				
	Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun)	72,43	72,49	72.59
	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	12.59	12.73	12.88
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (tahun)	10.7	10.88	11.02
	Pengeluaran Per kapita (Rp/ kap/ bln)	17075,43	17.468	17.707
2	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	398.920	384.300	389.690
3	Proporsi penduduk miskin (%)	3.93	3.75	3.77

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018

Berdasarkan data kemiskinan yang diolah, menunjukkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk miskin mulai dari terbanyak hingga tersedikit yaitu Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta tahun 2017 sebanyak 389,69 ribu orang. Kota administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 99,31 ribu orang sedangkan Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3,09 ribu orang.

Berdasarkan capaian pembangunan manusia Jakarta yang sangat tinggi dan jumlah penduduk miskin yang semakin mengecil dari total populasi, menandakan bahwa Jakarta cukup baik dalam pengembangan pembangunan manusia. Selain itu, Jakarta berhasil menciptakan masyarakat ekonomi kelas menengah. Jakarta tidak hanya sangat metropolitan, namun juga memiliki masyarakat ekonomi kelas menengah atas tertinggi di Indonesia.¹¹ Kondisi dan perilaku kelompok ini pada akhirnya sangat menentukan peta politik di Jakarta.

4.1.2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Dalam sejarahnya, kesatuan bangsa dan politik berasal dari sebuah direktorat jenderal di kementerian dalam negeri bernama direktorat jenderal

¹¹ Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, hal. 4

kesatuan bangsa dan politik (Ditjen Kesbangpol)¹². Direktorat ini bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dalam rangka membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara. Akan tetapi pada tahun 2015 Ditjen Kesbangpol mengalami pergantian nomenklatur menjadi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Sebagai instansi yang penting baik di pusat maupun di daerah dan harus terus terhubung. Maka badan kesbangpol ditetapkan sebagai instansi vertikal di bawah arahan kementerian dalam negeri, dimana urusan pemerintahan umum merupakan amanat pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah¹³.

Sebagai badan berstatus unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, badan kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi badan kesatuan bangsa dan politik berkoordinasi dengan asisten pemerintahan.

Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta memiliki visi organisasi berupa “Terwujudnya masyarakat yang berideologi Pancasila, berwawasan kebangsaan, demokratis, berketahanan ekonomi, sosial dan budaya”¹⁴. Adapun misi yang dicanangkan oleh badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta adalah:

Pertama, meningkatkan pemahaman ideologi pancasila, wawasan kebangsaan kesadaran bela negara dan pembauran kebangsaan untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, meningkatkan Ketahanan ekonomi, seni, budaya, beragama dan organisasi kemasyarakatan yang sejahtera dengan menjunjung nilai-nilai kebinekaan, toleransi dalam memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.

Ketiga, meningkatkan pemahaman budaya politik yang demokratis dan membangun kemitraan kelembagaan politik yang harmonis.

Keempat, meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan serta penanganan konflik yang memberikan dampak terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, memelihara sinergitas koordinasi di bidang intelijen daerah terhadap kerawanan sosial serta perlintasan dan pergerakan orang asing, tenaga kerja asing dan ormas asing.

¹² Dapat dilihat di: <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/pages/2016/235/Sejarah#>

¹³ Dapat dilihat di: <http://kesbangpol.kemendagri.go.id/index.php/subblog/read/2016/5250/2017-Badan-Kesbangpol-jadi-Instansi-Vertikal/2327>

¹⁴ Dapat dilihat di: <http://bakesbangpoljakarta.com/pages/visi-misi>

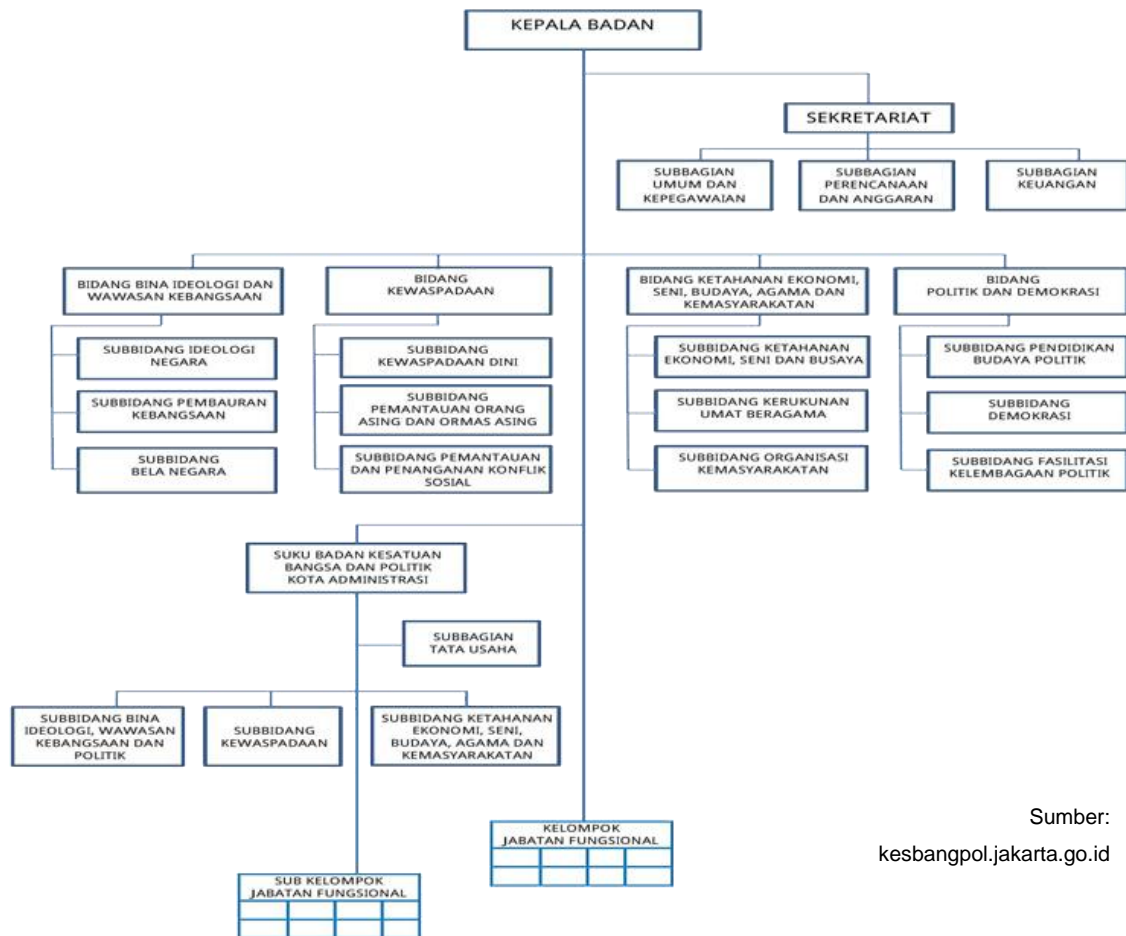
Keenam, meningkatkan transparansi pelayanan publik urusan kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai peraturan gubernur DKI Jakarta 258 tahun 2016 Pasal 3 Ayat 1, menyebutkan “tugas pokok badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta adalah Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”. Badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Badan Kesbangpol;
- (2) pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Kesbangpol;
- (3) penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- (4) pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;
- (5) fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi; fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;
- (6) fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;
- (7) pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya; pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi;
- (8) pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan organisasi masyarakat asing;
- (9) pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan Kesbangpol;
- (10) pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Kesbangpol;
- (11) pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesbangpol; dan
- (12) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi badan kesbangpol.¹⁵

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta menyusun struktur organisasi untuk mempermudah pelaksanaannya. Struktur organisasi tersebut adalah berupa:

¹⁵ Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 258 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pasal 3 ayat 2



Sumber:
kesbangpol.jakarta.go.id

Gambar 4.2 Struktur organisasi bakesbangpol provinsi DKI Jakarta

4.2 Temuan Hasil Penelitian

Fokus analisis pada penelitian ini terkait peran Badan kesatuan bangsa dan politik (Bakesbangpol) Provinsi DKI Jakarta sebagai perwujudan Pemerintah Provinsi dalam upaya pencegahan konflik di wilayah Provinsi DKI Jakarta dengan studi kasus yang digunakan adalah pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam upaya mendeteksi sejak dini potensi konflik yang dapat muncul setiap saat di DKI Jakarta dan disertai upaya pencegahannya agar potensi konflik tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang nantinya akan lebih sulit dihentikan.

Peran dari bakesbangpol sendiri dalam mengatasi potensi konflik yang muncul pada pilgub DKI Jakarta 2017 adalah dengan melakukan pendataan berupa deteksi dini dan pemetaan wilayahnya dari potensi konflik yang bisa muncul. Selanjutnya untuk mengetahui peran bakesbangpol dalam upaya pencegahan yang akan ditimbulkan dari potensi konflik tersebut. Pada akhirnya upaya kepemimpinan

kesbangpol sebagai *leading sector* dan melakukan sinergitas dengan berbagai *stakeholder* terkait penanganan konflik sosial sebagaimana diamanatkan peraturan menteri dalam negeri no 42 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial ditambah dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur No 125 Tahun 2017 yang melegitimasi terbentuknya tim pos komando (posko) bersama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 .

Kemudian data yang ditampilkan dalam pembahasan bab ini adalah data yang diperoleh baik primer melalui wawancara secara langsung, maupun sekunder berupa data penguat dan pendukung yang didapatkan dari narasumber dan dokumen baik internet maupun fisik yang dapat dianalisis sesuai penelitian di lapangan. Narasumber sebagai data primer pada penelitian ini adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta, KPU Provinsi DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta, Kodam Jaya Jayakarta, dan Polda Metro Jaya.

4.2.1 Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017

Provinsi DKI Jakarta selalu mendapatkan peringkat terbaik dalam tata laksana demokrasi di Indonesia. Hal ini didapatkan melalui hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Adapun capaian provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2015 hingga 2017 mengalami fluktuasi antara lain tahun 2015 85,32 poin; tahun 2016 70,85 poin; dan tahun 2017 84,73 poin.

Pencapaian ini jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, menjadi isyarat bahwa DKI Jakarta memiliki iklim demokrasi yang baik setiap tahunnya. Walaupun pencapaian demokrasi itu menurun pada tahun 2016 dimana dipengaruhi oleh banyak faktor dimana kontestasi pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang disertai isu SARA menjadi salah satu faktor penurunnya. Pencapaian DKI Jakarta tahun 2016 punya rincian aspek kebebasan sipil 81,11; aspek hak-hak politik 67,54; dan aspek lembaga demokrasi 63,19. Menurut BPS, penurunan indeks pada tahun 2016 terjadi di semua aspek dan dipengaruhi oleh tiga hal, antara lain: diakibatkan oleh aktivitas demonstrasi yang bergulir atau demo yang

disertai kekerasan (verbal maupun fisik) yang cukup tinggi, kemudian partai politik dinilai tidak cukup baik melakukan kaderisasi sehingga aspek hak politik menurun, serta faktor transparansi anggaran dan pengelolaan APBD yang menurun juga.¹⁶

Melihat hasil pemilihan umum legislatif di DKI Jakarta tahun 2014, tercatat bahwa ada 5 partai peraih suara terbanyak di Jakarta sehingga mengantarkan wakilnya di dewan perwakilan rakyat daerah DKI Jakarta. Adapun lima partai tersebut antara lain: PDIP (28 kursi), Partai Gerindra (15 kursi), PKS (11 kursi), PPP (11 kursi) dan Partai Demokrat serta Partai Hanura (masing-masing 10 kursi). Adapun rincian lima partai politik dengan jumlah pemilih terbanyak tiap wilayah antara lain: Jakarta Pusat (PDIP, Gerindra, Demokrat, PKS dan Golkar), Jakarta Utara dan kepulauan seribu (PDIP, Demokrat, Gerindra, PKS dan Hanura), Jakarta Timur (PDIP, PPP, Gerindra, PKS, dan Demokrat), Jakarta Selatan (PDIP, Gerindra, PKS, PPP dan Golkar), dan Jakarta Barat (PDIP, Gerindra, PPP, Hanura, dan Golkar). Berdasarkan *head to head* basis pemilih legislatif tahun 2014 dengan partai pengusung pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terutama pada putaran kedua, disimpulkan bahwa PDIP unggul di semua wilayah di Jakarta dan wilayah Jakarta utara kepulauan seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Timur serta Jakarta Barat berpotensi terjadi ketegangan akibat kontestasi Pilgub DKI.

Selain itu, komposisi partai pendukung pasangan calon pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 menunjukkan kelanjutan kompetisi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2012 dan Pilpres tahun 2014. Bahkan terlihat jelas adalah partai koalisi utama yang dibangun pada pilgub DKI Jakarta 2017 kurang lebih sama dengan koalisi utama pada Pilpres tahun 2014, sehingga ketegangan dan kompetisi pun pada akhirnya terwarisi.

Pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 diselenggarakan sebanyak dua putaran yaitu Rabu, 15 Februari 2017 sebagai putaran pertama, dan Rabu, 19 April 2017 sebagai putaran kedua. Terjadinya

¹⁶ Gabrillin, Abda. Indeks Demokrasi di DKI Jakarta Alami Penurunan, Ini Penyebabnya. Tersedia di: <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/12240901/indeks-demokrasi-di-dki-jakarta-alami-penurunan-ini-penyebabnya> (diakses pada oktober 2018)

dua putaran ini merupakan kekhususan yang diberikan oleh pemerintah untuk DKI Jakarta dan tidak terjadi di wilayah lainnya sesuai amanat Undang-undang No 29 Tahun 2007 tentang pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.” Ayat (2): “dalam hal tidak ada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama”.

Atas dasar itulah KPU Provinsi DKI Jakarta memutuskan dilaksanakan putaran kedua pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sebagaimana terjadi pada pilgub DKI Jakarta pada periode 2012.

4.2.1.1 Profil kontestan

Pada pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini diikuti oleh 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan pasangan terdiri dari satu pasang dari petahana dan dua pasang penantang baru. Pasangan pertama adalah Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni, pasangan kedua adalah Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saepul Hidayat, dan pasangan ketiga Anies Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno.

Semua pasangan calon ini didukung oleh partai politik dan tidak ada yang maju sebagai pasangan independen, sebagaimana yang diperbolehkan oleh UU tentang pilkada. Lebih jelasnya, partai pendukung 3 pasangan calon ini akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3 Partai Pengusung Paslon Pilgub DKI Jakarta tahun 2017

	Agus H. Yudhoyono – Sylvia Murni	Basuki T. Purnama – Djarot Syaiful H.	Anies R. Baswedan – Sanidaga S. Uno
Partai Pengusung	Demokrat, PKB, PPP dan PAN,	PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura	Gerindra, PKS
Tagline	Siap membangun Jakarta untuk rakyat	Kerja	Maju kotanya, Bahagia Warganya

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

4.2.1.2 Jumlah pemilih Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Jumlah penduduk DKI Jakarta yang terdata pada tahun 2017, menurut data BPS DKI Jakarta adalah berjumlah 10.374.200 Jiwa. Dari total penduduk DKI Jakarta tersebut yang memiliki hak pilih dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh KPU DKI Jakarta adalah sejumlah 7,3 juta jiwa, dengan rincian putaran pertama 7.108.589 dan putaran kedua 7.318.280¹⁷. Penambahan ini terjadi setelah pada putaran pertama banyak kendala yang dihadapi panitia pelaksana di lapangan terkait masyarakat yang belum tercantum pada DPT yang ditetapkan pada putaran pertama.

Dari jumlah DPT DKI Jakarta, tercatat wilayah Jakarta Timur memiliki jumlah DPT terbanyak dengan 2 juta jiwa dan Kepulauan Seribu yang paling sedikit dengan 17,7 ribu. Dari total DPT yang ada, dilaporkan yang menggunakan hak pilihnya sejumlah 75,75% pada putaran pertama dan 77,08%. Sedangkan sekitar 1,6 juta jiwa penduduk DKI yang masuk dalam DPT tidak menggunakan hak pilihnya atau golput. Berikut rincian jumlah pemilih di DKI Jakarta beserta pemilih yang golput:

No	Kab/Kota	Pemilukada Gubernur			Jumlah
		Suara Sah	Suara Tidak Sah	Tidak Menggunakan hak pilih	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kepulauan Seribu	14,187	168	3,511	17,866
2.	Jakarta Selatan	1,214,304	14,057	402,999	1,631,360
3.	Jakarta Timur	1,605,266	18,267	436,596	2,060,129
4.	Jakarta Pusat	576,449	6,395	184,199	767,043
5.	Jakarta Barat	1,296,739	10,995	399,661	1,707,395
6.	Jakarta Utara	884,408	7,833	259,439	1,151,680
Provinsi DKI Jakarta		5,591,353	57,715	1,686,405	7,335,473

Sumber : KPU Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4.3 Jumlah surat suara pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini menjadi pengalaman pertama bagi para pemilih pemula dan pemilih disabilitas sebagai pembuktian bahwa pilgub ini merupakan proses demokrasi yang terbuka,

¹⁷ Data dan Infografik Pilkada Jakarta 2017. KPU Provinsi DKI Jakarta

bebas, dan dapat diikuti oleh seluruh penduduk Indonesia yang berhak memilih tanpa terkecuali. Adapun komposisi pemilih yang tercatat pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017, antara lain:

Tabel 4.4 Pemilih Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 per Kabupaten/Kota

Kota/Kabupaten	Pemilih Laki-laki dan Perempuan (Total)	Pemilih Pemula	Pemilih Disabilitas
Jakarta Barat	1.681.498	4.868	1.841
Jakarta Pusat	757.515	3.055	558
Jakarta Selatan	1.606.921	4.716	853
Jakarta Timur	2.025.157	5.349	1441
Jakarta Utara	1.129.494	3.542	306
Kep. Seribu	17.695	93	30

Sumber: KPU Provinsi DKI Jakarta

Melihat karakteristik demografis pemilih (tingkat pendidikan, pekerjaan, dan usia) pada pilgub DKI Jakarta, dapat diketahui bahwa pemilih di Jakarta memiliki berbagai karakteristik seperti pemilih yang rasional, psikologis dan sosiologis. Hal ini sejalan pendapat peneliti LIPI, Ikrar Nusa Bakti, bahwa pemilih Jakarta tidak serta merta menentukan pilihan pada karena ketenaran atau jabatan yang dulu sempat diemban. Namun, warga butuh sosok calon yang memiliki gagasan dan mampu bekerja membangun Jakarta.¹⁸

Selain pemilih rasional, di Jakarta masih ditemukan pemilih psikologis dan sosiologis.¹⁹ Pemilih psikologis menjadikan karakteristik pribadi kandidat sebagai tolak ukur pilhan politik, seperti ketampanan, kesantunan, keras, tegas dan lain-lain. Biasanya pemilih ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dan terjadi pada pemilih pemula dan pemilih perempuan. Adapun pemilih sosiologis akan menentukan pilihan politiknya pada kandidat dengan dasar relasi atau kesamaan suku dan budaya. Hal ini dipengaruhi kondisi Jakarta yang

¹⁸ Sarwanto, Abi. 2016. Pengamat: Tipe Pemilih DKI Jakarta Rasional. Online. Dapat diakses di: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160208202453-32-109613/pengamat-tipe-pemilih-dki-jakarta-rasional>

¹⁹ Zulfikar. 2016. Tiga Jenis Pemilih di Pilkada Serentak: Tipe Psikologis Pilih yang Gateng, Tegas, Santun. Dapat diakses di: <http://www.tribunnews.com/nasional/2016/10/11/tiga-jenis-pemilih-di-pilkada-serentak-tipe-psikologis-pilih-yang-gateng-tegas-santun>

merupakan wilayah yang heterogen secara suku, budaya dan etnis dan tersebar di berbagai wilayah di Jakarta.

4.2.1.3 Jumlah Perolehan Suara Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Sebagaimana pada pilgub DKI Jakarta tahun 2012 yang mengalami dua putaran pemungutan suara, pada tahun 2017 pun dilakukan dua periode pemungutan suara. Pada putaran pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur diikuti oleh tiga pasangan calon, yaitu: pasangan pertama adalah Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saepul Hidayat, pasangan kedua adalah Anies Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno, dan pasangan ketiga adalah Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni.

Namun, dikarenakan tidak ada pasangan calon yang mendapatkan suara 50%+1 dari jumlah pemilih, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua. Putaran kedua hanya diikuti oleh pasangan Basuki Tjahja Purnama – Djarot Saepul Hidayat dan pasangan Anies Baswedan – Sandiaga Salahudin Uno. Adapun pasangan Agus Harimurti Yudhoyono – Sylviana Murni tidak dapat mengikuti putaran kedua karena perolehan suara yang paling kecil dari kompetitor lainnya.

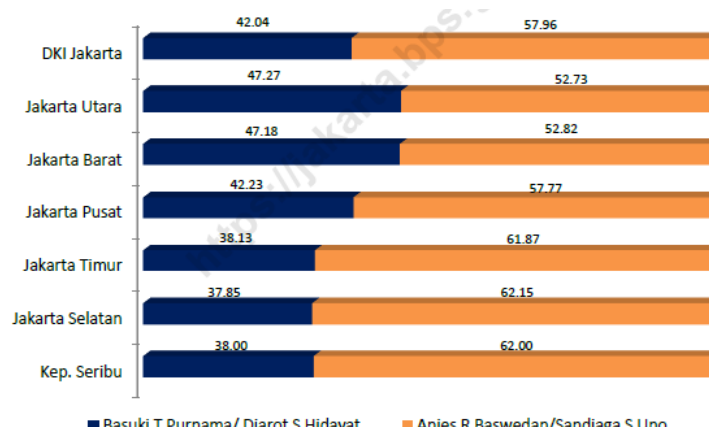
Lebih jelasnya perolehan suara di putaran pertama pilgub DKI Jakarta tahun 2017, sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Kep. Seribu		Jakarta Selatan		Jakarta Timur		Jakarta Pusat		Jakarta Barat		Jakarta Utara		Jumlah	
		Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%	Jml Suara	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni	3,891	27.26	177,363	14.77	309,708	19.42	101,744	17.87	203,107	16.11	142,142	16.53	937,955	17.05
2	Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat	5,532	38.76	465,524	38.77	618,880	38.81	244,727	42.99	613,194	48.63	416,720	48.45	2,364,577	42.99
3	Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno	4,851	33.98	557,767	46.46	665,902	41.76	222,814	39.14	444,743	35.27	301,256	35.02	2,197,333	39.95
Jumlah suara sah seluruh pasangan calon		14,274		1,200,654		1,594,490		569,285		1,261,044		860,118		5,499,865	

Sumber : KPUD Provinsi DKI Jakarta

Gambar 4.4 Perolehan suara putaran pertama pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Berikut presentase perolehan suara pilgub DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran kedua:



Gambar 4.5 Perolehan suara putaran kedua pilgub DKI Jakarta tahun 2017

Hasil rekapitulasi resmi KPU Provinsi DKI Jakarta sudah final dan dengan dikeluarkannya surat keputusan Nomor: 95/Kpts/KPU-Prov-010/2017 tentang penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih pilgub DKI Jakarta tahun 2017 putaran 2 tanggal 5 Mei 2017, ditetapkan pasangan calon nomor urut 3. Pasangan terpilih ini menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur ke-20 DKI Jakarta setelah masa kemerdekaan.

Hasil putaran kedua ini berbeda sekali dengan hasil yang didapatkan oleh Basuki Tjahja Purnama ketika berpasangan dengan Joko Widodo pada pemilihan putaran kedua pada pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Pada putaran kedua, pasangan ini berkompetisi dengan pasangan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli. Pada putaran kedua tahun 2012 dimana pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahja Purnama memenangkan kompetisi dengan memperoleh 2.472.130 (53,82%) suara sedangkan Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli memperoleh 2.120.815 (46,18%) suara. Kemenangan ini didapatkan oleh Basuki Tjahja di semua wilayah yang terdiri dari lima kotamadya dan satu kabupaten administrasi, dan dengan total pemilih sebanyak 6.996.951 pemilih.²⁰

4.2.1.4 Jumlah Pelanggaran Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Jika dilihat dari sebaran suara pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 pada putaran pertama, dapat diketahui kantong suara yang

²⁰ Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Putaran kedua di tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2012

dimenangkan oleh masing-masing pasangan calon. Persebaran itu antara lain: Pasangan Basuki Tjahja – Djarot unggul pada wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sedangkan pasangan Anies – Sandi, hanya unggul di wilayah Kepulauan Seribu, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

Namun, pada putaran kedua berbagai manuver dilakukan oleh masing-masing pasangan calon dan tim suksesnya untuk meraih simpati dari masyarakat yang tidak memilih pada putaran pertama dan para pendukung pasangan nomor urut 1 yang diberikan kebebasan untuk bisa memilih pasangan manapun pada putaran kedua nanti dan pasangan calon pun tidak menyatakan dukungan politik kepada publik.

Akibatnya, kampanye negatif dan kampanye hitam dilakukan oleh tim pendukung pasangan calon seperti *money politic*, kampanye berbalut sembako murah, serangan fajar, tekanan kelompok masyarakat terhadap masyarakat lainnya baik di lingkungan kerja maupun sosial, sampai nuansa politik identitas dan isu SARA semakin terdengar di kalangan masyarakat akar rumput. Isu itu diekspresikan dengan terjadinya beberapa aksi penolakan yang dilakukan masyarakat kepada pasangan calon atau tim kampanye untuk melakukan kampanye di daerah tersebut, bahkan yang lebih keras lagi adalah sebuah pemandangan di salah satu masjid masyarakat yang mengumumkan tidak akan menyolatkan jenazah warganya yang mendukung salah satu pasangan calon yang berbeda dengan mayoritas warga di wilayah tersebut. Ekspresi ini merupakan akibat dari berkembangnya politik identitas dan politik *populisme* yang membangkitkan emosi dan sentimen masyarakat Jakarta.

Akhirnya, pada putaran kedua pilgub DKI Jakarta secara keseluruhan pasangan Anies – Sandi memenangkan pertarungan dari pasangan Basuki – Djarot di semua wilayah DKI Jakarta. Terlebih di lumbung suara pasangan Basuki – Djarot, suara yang didapat oleh pasangan itu cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan²¹.

²¹ Data dan infografik Pilkada Jakarta 2017 hal 38

Misalnya, Jakarta Utara 416.720 (1) 418.096 (2), Jakarta Barat 613.194 (1) 611.180 (2), dan Jakarta Pusat 244.727 (1) 243,574 (2).

Adapun Bawaslu provinsi DKI Jakarta merilis temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 sejumlah 308 temuan dan laporan²². Rincian ini terdiri dari 200 laporan dan temuan pada putaran pertama dan 108 pada putaran kedua. Pada putaran pertama terdiri dari: Panwaslu Provinsi 62 kasus, Panwaslu Jakarta Utara 37 kasus, Panwaslu Jakarta Timur 31 kasus, Panwaslu Jakarta Barat 24 kasus, Panwaslu Jakarta Pusat 14, dan Panwaslu Kepulauan Seribu 13 kasus. Dari total 200 laporan dan temuan, diputuskan 78 bukan termasuk pelanggaran pemilu, 112 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran tindak pidana pemilihan.

Putaran kedua, tercatat 108 total temuan dan laporan, terdiri dari: Panwaslu Provinsi 29 kasus, Panwaslu Jakarta Timur 17 kasus, Panwaslu Jakarta Barat 16 kasus, Panwaslu Kepulauan Seribu 14 kasus, Panwaslu Jakarta Pusat 13 kasus, Panwaslu Jakarta Utara 11 kasus, dan Panwaslu Jakarta Selatan 8 kasus. Dari total laporan dan temuan, tercatat 69 temuan dan laporan tidak termasuk pelanggaran, 25 pelanggaran administrasi, 5 tindak pidana pemilihan, dan 1 pelanggaran kode etik.

Dugaan pelanggaran bervariasi, mulai dari tidak terdaftar di DPT, pengeroyokan pada pendukung pasangan calon, surat suara habis, penggunaan form c6 milik orang lain, memilih sebanyak dua kali, penerbitan form A5 bukan dari KPU, sampai pelanggaran administrasi dan alat peraga kampanye dari pasangan calon, serta pelanggaran penyelenggara. Semua laporan dan temuan pelanggaran ditindaklanjuti dan dikaji oleh tim penegak hukum terpadu (Gakumdu) pilgub DKI Jakarta yang terdiri dari Bawaslu, Polda Metro dan Kejaksaan.

4.2.2 Potensi Konflik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

²² Kompas.com. 2017. Ada 308 temuan dan laporan dugaan pelanggaran pada pilkada DKI 2017. Dapat diakses di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/03/19075161/Ada.308.temuan.dan.laporan.dugaan.pelanggaran.pada.pilkada.DKI.2017>

Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 sangat menarik perhatian tidak hanya penduduk Jakarta, tapi penduduk Indonesia bahkan penduduk dunia. Hal ini terbukti dengan pemberitaan yang intensif dilakukan oleh media cetak, televisi bahkan media sosial baik dalam maupun luar negeri. Hal ini menjadi penting tidak semata-mata pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah terjadi di Jakarta yang merupakan ibukota negara, namun dinamika politik dan sosial yang terjadi selama pelaksanaannya sangat dinamis dan penuh intrik.

Dinamika yang terjadi selama pelaksanaan pilgub DKI Jakarta ini sejatinya dapat menjadi potensi terjadinya konflik. Benar saja pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta 2017, isu sara mengemuka di permukaan dan menyerang salah satu pasangan calon dalam bentuk demonstrasi massa berupa penolakan di dunia nyata maupun provokasi dan serangan di dunia maya.

Sebenarnya apa yang terjadi di DKI Jakarta ini adalah kelanjutan dari proses politik sebelumnya, selesai atau belum akan ada kelanjutan pada proses politik selanjutnya dan akan dihubungkan. Begitu juga konflik, apabila konflik sebelumnya tidak selesai maka akan menjadi efek bola salju yang setiap waktu akan semakin membesar dan mencari waktu meledaknya. Isu SARA adalah bagian kecil pada konflik di pilgub DKI Jakarta namun mendapat perhatian yang besar dari masyarakat. Isu sara ini hanya digunakan sebagai pemicu konflik dari yang tadinya kecil menjadi lebih besar bahkan menjadi dominan akibat respon terhadap isu sara yang dimainkan oleh lawan politiknya. Artinya sebenarnya terdapat banyak permasalahan dan konflik laten yang tak tampak di permukaan.

Ada beberapa laten yang menjadi awal dan pemicu terjadinya isu SARA di DKI Jakarta, antara lain: kasus ketidakadilan salah satu pasangan calon (sekaligus petahana) pada penduduk miskin Jakarta yang menjadi korban pengusuran, dugaan kasus korupsi, ketidaksukaan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan, perebutan kepentingan, bahkan kekuasaan dan etika politik. Hal ini sejalan dengan pernyataan pak Mazhar kasubdit demokrasi dan pak Sony kasubdit penanganan konflik sosial bakesbangpol DKI Jakarta bahwa:

“Secara umum pelaksanaan pilgub DKI berjalan kondusif. Tapi ada sebagian masyarakat yg menggunakan isu SARA (jangan pilih pemimpin non muslim) tapi jumlahnya tidak besar. Menjadi besar ketika akhirnya direspon oleh salah satu kandidat yang merasa tersudut dengan isu tersebut dan terpancing mengeluarkan statemen dan pada akhirnya viral dan diduga melakukan penistaan agama. Padahal, sebelum SARA ini muncul, banyak isu lain yang sebenarnya muncul di masyarakat seperti

kasus korupsi, ketidakadilan dan penggusuran, kemiskinan, pengangguran dan gaya kepemimpinan. Semua isu itu muncul di masyarakat sebagai upaya menjegal gubernur basuki untuk maju kembali pada pilgub DKI tahun 2017”.²³

Isu SARA terhadap salah satu calon itu berkembang kembali dengan cepat setelah ucapan itu viral dan menjadi trending di media sosial. Terkait dengan itu, Namun ketegangan dan “perang” yang terjadi itu hanya ada di dunia maya saja bahkan sangat kecil sekali atau hampir tidak termanifestasi di dunia nyata. Hal ini sejalan dengan pernyataan pak mazhar kasubdit demokrasi bakesbangpol DKI Jakarta bahwa:

“suasana kampanye yang terjadi di pilgub DKI kali ini terjadi hampir di semua dunia, nyata sampai maya, sampe dunia maya mah sangat sporadis. Aktivitas kampanye dunia nyata kan cukup mudah untuk diarahkan, dipantau dan diawasi. Tapi aktivitas dunia maya, cukup sulit melakukan pengawasan dan pemantauannya, karena jagatnya sangat luas sekali”.²⁴

Selain isu SARA dan isu yang mengawalinya, ada hal teknis lainnya yang dapat menjadi potensi terjadinya sengketa dan konflik pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Hal teknis tersebut dapat berupa kampanye (*black campaign* dan *negative campaign*), hubungan antar kandidat, hasil pemilu, penetapan DPT, netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara pemilu, sampai kecurangan pada perhitungan suara. Hal ini sesuai dengan penjelasan pak andi maulana, tim ahli/asistensi Bawaslu DKI Jakarta, bahwa:

“Selain isu sara, ada hal lain yang berpotensi konflik pada pilkada dan itu terjadi berdasarkan temuan dan laporan yang masuk ke bawaslu. Antara lain: kampanye, alat peraga kampanye, tindakan provokasi dan intimidatif, permasalahan DPT, sara, kampanye di tempat ibadah, penggunaan Medsos Anonim, akun bermasalah dan penyebar fitnah, kecurangan Pemilih dan kecurangan di TPS”.²⁵

Selain itu, Polri juga sejalan dengan pernyataan Bawaslu mengenai potensi konflik lain dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. seperti diungkapkan bapak Muheni dari kasubdit 1 Dirintelkam polda metro jaya yang menyebutkan:

“Isu Sara memang menjadi isu utama pada pelaksanaan pilgub DKI jakarta tahun 2017 silam, tapi itu disebabkan oleh banyak faktor dan sumber awalnya dan tidak ujug-ujug. Namun banyak hal lain yang dapat

²³ Wawancara dengan narasumber pada 10 September 2018

²⁴ Wawancara dengan narasumber pada 10 September 2018

²⁵ Wawancara dengan narasumber pada 17 Oktober 2018

menjadi potensi konflik atau sengketa bagi keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum, seperti : profesionalisme penyelenggara, netralitas ASN, politik petahana, politik uang, permasalahan ekonomi, reklamasi, media siber, sampai gesekan antar pendukung dan ormas. Semua informasi tersebut didapatkan berdasarkan hasil analisis dari kegiatan babulbaket yang dilakukan oleh kepolisian.”²⁶

Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api, dan tidak ada api tanpa ada yang memicu percikan api, kira-kira begitu menanggapi konflik sara di pilgub DKI Jakarta. Tidak jauh berbeda dengan yang dijelaskan oleh polda metro, pihak Kodam Jaya, melalui pabandya asisten teritorial Bapak markuwat, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta berjalan dengan lancar namun memang terjadi beberapa hal yang mengganggu kondusifitas pelaksanaan pesta demokrasi ini, sebut saja isu sara. Isu sara ini tidak berdiri sendiri tapi ada isu lain yang mengawalinya dan sangat menempel dengan masyarakat. Penggunaan isu sara dalam pilgub memang tidak dibenarkan namun apabila digunakan oleh masing-masing pribadi ya itu kan perkara masing-masing untuk memilih pasangan calon yang dirasa pas oleh pemilih. Dia bisa saja memilih karena kesamaan etnis, suku, agama bahkan memilih karena visi dan misinya. Adapun dalam mengatasi latar belakang yang menggawangi isu sara ini kodam berkoordinasi dengan kepolisian selaku institusi yang berwenang dalam melakukan tindakan di lapangan. Karena posisi TNI disini hanya diperbantukan dalam pelapisan terhadap kepolisian sebagai pelaksanaan OMSP TNI. Hal ini dilakukan demi menjaga stabilitas politik dan sosial di jakarta selaku ibu kota negara. Namun TNI juga tetap berjaga-jaga mengantisipasi terjadi hal yang lebih besar yang mengancam kedaulatan Indonesia.”²⁷

Adapun KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai ujung tombak penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 membenarkan bahwa terjadi beberapa peristiwa pada penyelenggaraan yang apabila tidak ditangani dengan cepat dan optimal maka dapat menjadi potensi konflik yang besar. Kesigapan yang dilakukan oleh KPU provinsi DKI Jakarta dilatarbelakangi oleh pengalaman dari pilgub sebelumnya yang kurang lebih sama keadaanya serta sinergitas dan koordinasi yang dilakukan secara intensif dengan beberapa lembaga lintas sektoral yang dihimpun dalam posko bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Sesuai dengan pernyataan ibu Betty selaku ketua KPU Provinsi DKI Jakarta (komisioner KPU provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017), bahwa:

²⁶ Wawancara dengan narasumber pada 18 Oktober 2018

²⁷ Wawancara dengan narasumber pada 19 Oktober 2018

“Pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 berjalan dengan tertib, aman dan banyak progres belajar dari pengalaman pada pilgub sebelumnya. Namun memang tidak ada gading yang tak retak, ada beberapa kejadian yang memang dinamis di lapangan, seperti permasalahan DPT pada pemilihan putaran pertama yang masih harus dievaluasi, surat suara yang kurang dan lebih di TPS, kekurangpahaman panitia penyelenggara pemilu di TPS terhadap SOP, kurang profesional panitia penyelenggara di TPS, sampai pemilih ganda. Padahal upaya pencegahan sudah dilakukan oleh KPU dengan pemerintah provinsi, bakesbangpol maupun lembaga terkait. Misalnya terkait profesionalisme penyelenggara, KPU menyelenggarakan bimtek dan komunikasi secara intens kepada panitia pemungutan suara dan koordinasi dengan GAKUMDU bila dinilai ada tindak pidana pemilu. Terkait DPT, KPU berkoordinasi dengan kemendagri, disdukcapil DKI, bahkan sampai ke lurah agar didapatkan kondisi riil DPT di lapangan, walaupun masih terjadi trouble namun tetap dapat dikendalikan. Adapun dengan Kesbangpol dan pemprov sinergi dan koordinasi dilakukan dalam penganggaran, pelaksanaan sampai evaluasi pelaksanaan. Dalam upaya menggaet pemilih dan meningkatkan partisipasi, KPU melakukan sosialisasi pada seluruh elemen masyarakat Jakarta tanpa terkecuali termasuk 5 klasifikasi masyarakat prioritas: pemula, perempuan, tokoh agama, kelompok marginal, dan disabilitas (difabel).”²⁸

Berdasarkan temuan hasil temuan penelitian, disimpulkan beberapa potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 antara lain: a) isu SARA dan penistaan Agama, b) ketidakadilan, c) perebutan kekuasaan dan politik; d) penyelenggaraan pemilu; dan e) petahana dan Netralitas ASN.

4.2.3 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

Peran pemerintah daerah dalam melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik adalah sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di wilayah pemerintahannya yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa konflik. sebagaimana amanat undang-undang no 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Terlebih konflik yang terjadi adalah di wilayah ibukota negara, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi.

Selain itu, pemerintah daerah pun turut berperan andil dalam menghindarkan masyarakat dari ketidakadilan dan kesenjangan, sehingga mampu mengantisipasi potensi konflik yang dapat muncul di wilayah DKI Jakarta. Oleh karena itu, kepemimpinan yang berintegritas dan dapat diterima

²⁸ Wawancara dengan narasumber pada 22 Oktober 2018

oleh semua rakyat adalah sebuah langkah awal dalam memberikan dampak yang baik dengan kebijakan yang dibuatnya. Dalam hal pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik di daerah, pemerintah memberikan porsi peran yang besar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur selaku kepala daerah, termasuk di dalamnya konflik politik (pemilihan gubernur).

Dari potensi konflik yang peneliti uraikan di atas, bahwa saat ini badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol) provinsi DKI Jakarta sudah melakukan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendeteksi potensi konflik sampai melakukan pencegahan terjadinya konflik pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Upaya pendeteksian dan pencegahan itu termanifestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan baik dilaksanakan oleh bakesbangpol maupun melakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder* terkait.

Kegiatan pencegahan tersebut antara lain: pelaksanaan tim terpadu penanganan konflik sosial, deteksi dini konflik, pemetaan dan pendeteksian wilayah konflik di Jakarta, melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, menghimbau masyarakat menjunjung demokrasi yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu sara, koordinasi dengan forum binaan bakesbangpol, dan pembentukan pos komando bersama pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Pembentukan posko bersama ini dilandasi dengan keputusan gubernur nomor 125 tahun 2017 yang ditandatangani oleh plt gubernur Sumarsono tentang Pembentukan Pos Komando (Posko) Bersama Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. Posko bersama yang dibentuk ini terdiri dari posko bersama tingkat provinsi sampai kelurahan. Hal ini dilakukan agar pemantauan pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini berjalan dengan lancar.

Upaya pemetaan dan deteksi dini potensi konflik menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam upaya pencegahan konflik. sebagaimana kita ketahui bahwa pencegahan konflik disusun oleh upaya deteksi dini, peringatan dini dan tanggap dini. Bakesbangpol provinsi DKI Jakarta pun menjadikan program pemetaan dan deteksi dini potensi konflik termasuk di dalamnya konflik pada pilgub DKI Jakarta. Upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang dilakukan oleh bakesbangpol sejatinya adalah bentuk peran strategis bakesbangpol dalam

membantu gubernur menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di DKI Jakarta.



Gambar 4.6 Peran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

Hal ini sejalan dengan pernyataan bapak Sony dari kesbangpol bahwa:

“Kesbangpol provinsi DKI Jakarta salah satu tugasnya adalah melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dan program yang terkait dengan wawasan kebangsaan, politik dan demokrasi, persatuan dan kesatuan bangsa serta fasilitasi penyelesaian permasalahan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan melakukan upaya pencegahan konflik mulai dari pemetaan dan pendataan potensi konflik dan upaya cegah dini dan deteksi dini. Oleh karena itu, bakesbangpol termasuk lembaga yang terlibat dalam unit kerja yang dinamakan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi. Adapun jobdesknya dapat dilihat dalam uu no 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. selain itu, dalam upaya pemetaan dan deteksi dini potensi konflik setiap tahun bakesbangpol selalu memprogramkan dalam rencana aksi tim terpadu penanganan konflik sosial yang sekaligus juga menjadi salah satu program bakesbangpol. Hasil pemetaan dan deteksi potensi konflik ini dievaluasi selama triwulan dalam satu tahun. Salah satu bentuk hasil pemetaan dan deteksi potensi konflik tersebut dibukukan setiap tahunnya, namun proses pembukuan tersebut hanya berlangsung sampai tahun 2015 saja. Kenapa tidak dilanjutkan, karena adanya keterbatasan anggaran dan sumber daya. Namun esensi hasilnya tiap tahun dilaporkan tetap menjadi acuan pada program bakesbangpol selanjutnya dan dilaporkan kepada gubernur selaku ketua tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi agar dapat menjadi sara dan rekomendasi kebijakan sensitif konflik selanjutnya.”²⁹

Jadi, pada momentum pilgub DKI Jakarta, kesbangpol tidak menerbitkan peta potensi dan deteksi konflik khusus edisi pilkada. Namun, bakesbangpol berkoordinasi dengan bawaslu dan kepolisian yang melakukan upaya pendataan kerawanan dan potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta silam. Oleh karenanya,

²⁹ Wawancara dengan narasumber pada 10 September 2018

sebagai bahan acuan, bakesbangpol menggunakan hasil yang sudah ada dan dilakukan analisis sesuai dengan kewenangan institusi.

Tim terpadu penanganan konflik sosial (TTPKS), ini merupakan implementasi Permendagri Nomor 42/2015 tentang pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial yang merupakan tindak lanjut dari PP nomor 2/2015. Dalam permendagri itu, bakesbangpol berperan sebagai sekretaris dan melakukan manajerial terhadap administrasi terkait langkah kerja tim terpadu penanganan konflik sosial dalam menanganani permasalahan konflik sosial secara umum termasuk di dalamnya perihal politik.

Selain tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi DKI Jakarta, sebagai upaya pengawasan dan pencegahan konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017, pemerintah provinsi DKI Jakarta membentuk sebuah tim kerja bersama yang dinamakan pos komando bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dalam tim kerja ini bakesbangpol memimpin tim pos komando menjalankan fungsi bersama namun tetap melakukan penyesuaian dengan fungsinya masing-masing. Tim kerja ini terdiri dari unit forkopimda, unit dinas di bawah pemerintah provinsi DKI Jakarta, unit penyelenggara pemilu dan unit masyarakat. Upaya ini dilakukan demi mewujudkan pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang aman, damai dan lancar. Hal ini sesuai dengan pernyataan pak mazhar kasubdit politik dan demokrasi bakesbangpol bahwa:

“terkait pengawasan dan monitoring pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017, dibentuklah pos komado bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Tim kerja ini berbeda namun berkorelasi dengan adanya tim terpadu penanganan konflik sosial provinsi DKI, karena memiliki kekhususan program sehingga ada pembagian konsentrasi kerja di internal bakesbangpol sendiri. Dibentuknya posko bersama ini, gubernur menyadari bahwa pilgub DKI Jakarta kini akan menghadapi banyak sekali ketegangan dan gesekan di masyarakat dan elit politik. Karena anggotanya terdiri dari banyak pihak terkait pada pelaksanaan pilgub DKI jakarta hal ini semakin memudahkan bakesbangpol berkoordinasi dalam melakukan pendataan potensi, pencegahan konflik dan evaluasi.”³⁰

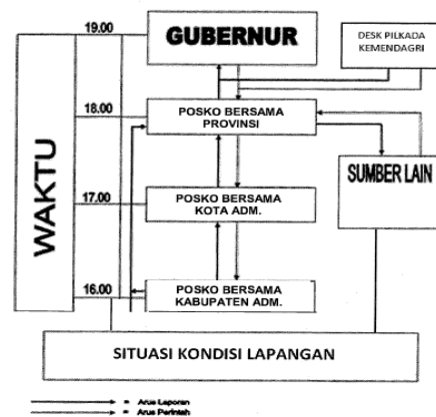
Berdasarkan surat keputusan gubernur DKI Jakarta nomor 125 tahun 2017 tentang pos komando bersama pilgub DKI tahun 2017, diamanatkan bahwa komposisi pos komando bersama tingkat propinsi DKI Jakarta, antara lain:

³⁰ Wawancara dengan narasumber pada 10 September 2018

Tabel 4.5 Komposisi Pos Komando Bersama Pilgub DKI Tahun 2017

Pengarah:	Sekretaris Daerah Prov DKI Jakarta.
Penanggung Jawab :	Asisten Pemerintahan Sekda Prov DKI Jakarta
Ketua:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov DKI Jakarta
Wakil Ketua:	Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Prov DKI Jakarta
Sekretaris:	Kepala Bidang Politik dan Demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov DKI Jakarta
Wakil Sekretaris:	Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Prov DKI Jakarta
<p>Anggota:</p> <p>A. Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya 2. Komando Daerah Militer Jaya/Jayakarta 3. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta 4. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 5. Komando Armada RI Kawasan Barat 6. Komando Operasi Angkatan Udara I 7. Badan Intelijen Negara Daerah DKI Jakarta 8. Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta <p>B. Unsur Penyelenggara</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta 2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi DKI Jakarta <p>C. Unsur Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat 2. Forum Kerukunan Umat Beragama 3. Forum Pembauran Kebangsaan 4. Radio Antar Penduduk Indonesia 5. Komunitas Lintas Partai Politik 6. Tim Sukses Pasangan Calon 	

Posko bersama sebagai gugus kerja lintas sektoral ini mempunyai alur dan mekanisme pelaporan, laporan bersifat berjenjang dari posko bersama tingkat paling rendah hingga paling tinggi disertai waktu pelaporan. Mekanisme koordinasi laporan dijelaskan dalam gambar berikut ini:



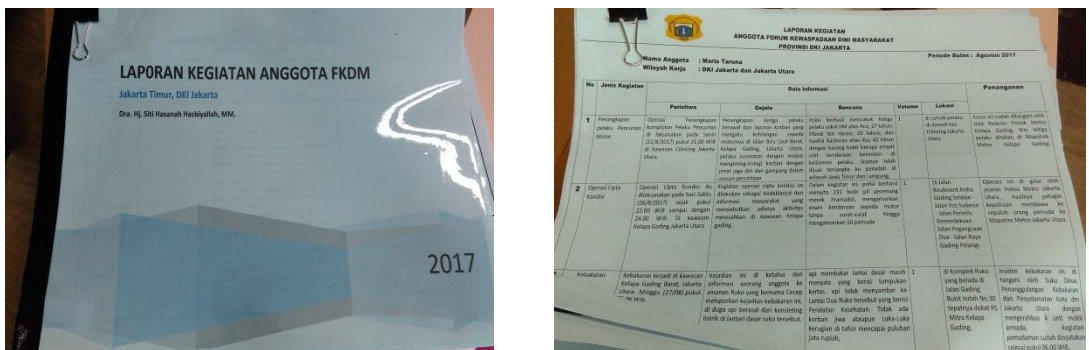
Gambar 4.7 Mekanisme laporan pos komando bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2017

Selain itu, sebagai *support system* gubernur dalam pelaksanaan upaya pencegahan dan penanganan konflik, menjaga persatuan kesatuan bangsa dan iklim politik demokrasi, Bakesbangpol senantiasa memberikan saran dan masukan kepada pimpinan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban sosial politik di DKI Jakarta selama pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Saran dan masukan itu terimplementasikan dalam berbagai aturan hukum yang diterbitkan oleh gubernur seperti: Instruksi Gubernur provinsi DKI Jakarta Nomor 154 tahun 2016 tentang Peningkatan Pembinaan Wilayah dalam Rangka Menghadapi Penyelenggaraan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi DKI Jakarta tahun 2017, Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kesiapsiagaan Menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017, serta Instruksi Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Peningkatan Kewaspadaan Menghadapi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua Tahun 2017.

Bakesbangpol pun melakukan koordinasi dengan forum-forum dibawah pembinaan bakesbangpol seperti : FKDM, FKUB dan lain-lain. FKDM lahir sebagai amanat dari kemendagri untuk pemerintah daerah (permendagri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah) dan diisi oleh masyarakat sipil mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. Secara fungsi FKDM ini berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah untuk senantiasa membantu pemerintah dalam membangun kewaspadaan dini di masyarakat.

Untuk DKI Jakarta merupakan forum yang baru berdiri di DKI Jakarta, sehingga masih belum menemukan pola dan strategi yang tepat. Hal ini diakui oleh bakesbangpol bahwa mekanisme organisasi untuk FKDM diserahkan

kepada forum tersebut, bakesbangpol hanya memberikan contoh teknik koordinasi dan pelaporan. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah provinsi memberikan reward berupa uang pengganti transportasi dan komunikasi yang dianggarkan dari APBD, selama melakukan koordinasi dengan bakesbangpol. Tidak hanya laporan tertulis tiap bulannya, laporan pun dilakukan secara real time dengan dibentuknya grup pada aplikasi *instant messenger* yang dihuni oleh perwakilan bakesbangpol dan anggota FKDM provinsi DKI Jakarta.



Gambar 4.8 Laporan bulanan FKDM kepada Bakesbangpol

Selain itu, FKDM dan Forum lainnya digunakan oleh bakesbangpol sebagai garda terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini dalam rangka pencegahan konflik di DKI Jakarta. Hal ini sejalan dengan pernyataan pak Sony dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta:

“permasalahan dan gesekan pada pilgub DKI Jakarta banyaknya di akar rumput dan masyarakat bawah. Sumber daya kesbangpol terbatas, karena keterbatasan itu kesbangpol melibatkan masyarakat baik dari FKDM, FKUB dan ormas lainnya untuk sama-sama menjaga kondusifitas pilgub DKI Jakarta. Adapun tentang FKDM, digunakan bakesbangpol sebagai kaki tangan pemerintah dalam melakukan pengumpulan data dan informasi terkait dengan kondisi terkini masyarakat, dan deteksi dini potensi konflik. Upaya pencegahan dini di masyarakat dapat dilakukan setelah melakukan koordinasi dengan lurah/camat terkait serta pihak kepolisian dan TNI.”³¹

Melihat peran dan fungsinya sebagai bagian pengumpul keterangan dan informasi, dimana fungsi ini merupakan salah satu fungsi intelijen, tak jarang FKDM ini disebut dengan intelijen sipil. Agar tidak ada persinggungan di bawah antara FKDM dengan aparat keamanan dan tidak terjadi tindakan *overlapping* dari FKDM, maka kepolisian melakukan pendampingan. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Muheni dari Kasubdit 1 Dirintelkam Polda Metro jaya, bahwa:

³¹ Wawancara dengan narasumber pada 10 September 2018

“Keberadaan FKDM sebagai kaki tangan pemerintah provinsi yang dibawah kendali bakesbangpol memang menjadi kebijakan yang harus ditaati sebagai amanat konstitusi. Namun, agar tidak terjadi gesekan dan hal yang tidak diinginkan, maka FKDM yang terpilih dari tiap wilayah dikumpulkan oleh kepolisian di wilayah masing-masing untuk diberikan pengetahuan dan bimbingan terkait batas kebijakan FKDM dan pendataan. Sehingga di lapangan bisa terjadi sinergi yang baik demi menjaga ketertiban dan keamanan pelaksanaan pilgub DKI Jakarta”³²

Selain itu isu sara, dalam pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ada potensi lain yang dapat menimbulkan konflik pada penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta. Misalnya saja money politic, profesionalisme penyelenggara pemilu, kualitas pemilu, kesiapan penyelenggara dan lain-lain. terkait dengan potensi lain itu, bakesbangpol memiliki peran yang sentral. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu betty ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, bahwa:

“pada pelaksanaan pilgub DKI jakarta dibutuhkan koordinasi dan sinergi dari berbagai kalangan dan instansi terkait. Hal ini dilakukan demi mewujudkan dan menjaga kualitas pemilhan umum yang baik. Setidaknya ada lima peran, yaitu: peran calon kandidat, peran NGO (termasuk okp, ormas dan lain-lain), peran media, peran pemda (bakesbangpol di dalamnya), dan peran penyelenggara (KPU dan Bawaslu). Masing-masing memiliki peran sesuai dengan kewenangannya. Adapun pemda dan bakesbangpol di dalamnya adalah peran anggaran APBD yang utama, hal ini penting karena harus ada anggaran yang sesuai agar terwujud pemilu sesuai yang diinginkan. Selain anggaran, pemda dan bakesbangpol pun berperan dalam proses pemilu misalnya sosialisasi, fasilitasi, bahkan sampai membantu KPU dalam menentukan daftar pemilih sementara dan tetap yang dikerjasamakan anatara KPU dan forkopimda.”³³

Selain uraian di atas, dalam mewujudkan peran pencegahan konflik pada pilgub DKI Jakarta sesuai dengan domain KPU, KPU provinsi DKI Jakarta membuat skema pengelolaan konflik secara langsung agar dapat mencegah dan menangani konflik secara cepat dan tepat sebagaimana digambarkan pada gambar di bawah ini



³² Wawancara dengan narasumber pada 18 Oktober 2018

³³ Wawancara dengan narasumber pada 22 Oktober 2018

Gambar 4.9 pengelolaan konflik pada KPUD DKI Jakarta

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada pembahasan ini peneliti akan membahas hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yang didapatkan dari berbagai narasumber untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat. Penjelasan pembahasan ini akan diuraikan secara sistematis dengan ditambahkan pengembangan antara fakta di lapangan dengan tinjauan pustaka yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya.

Pembahasan ini tersusun atas dua sub bagian yaitu: potensi konflik pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dan peran badan kesatuan bangsa dan politik provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan konflik pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017.

4.3.1 Potensi Konflik Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Pada media pemberitaan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, jenderal Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 termasuk pelaksanaan pilkada yang ramai dan membahayakan keamanan. Ada empat faktor penyebab kegaduhan pilgub DKI Jakarta, yaitu: pertama, isu agama; kedua, masalah kekerasan; ketiga, ketidaksukaan dan ketidaknyamanan terhadap cara bicara; keempat, antara partai pendukung pemerintah dan partai oposisi, tetap bersebrangan.³⁴

Selain itu, Polri menerbitkan 10 variabel potensi konflik yang dapat muncul dan mengganggu pelaksanaan pilkada di Indonesia. Pertama, profesionalitas penyelenggara pemilu. Kedua, konflik kepengurusan partai politik. Ketiga, calon petahana. Variabel berikutnya ialah profesionalitas Panitia Pengawas, kondisi geografis, potensi konflik pasangan calon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan keamanan ketertiban masyarakat, hingga profesionalitas pengamanan.³⁵

Akhirnya, berkaca pada kondisi di lapangan dan analisis teoritis yang dilakukan, potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 antara lain: a) isu SARA dan penistaan agama, b) netralitas aparatur sipil negara; c) profesionalitas penyelenggara pemilu; d) penyelenggaraan pemilu; serta e) konflik kepentingan dan kekuasaan. Akan

³⁴ Putsanra, Dipna Videlia. 2018. Alasan Kapolri Nilai Pilkada 2018 Lebih Aman dari Pilgub Jakarta. Online dapat diakses di: <https://amp.tirto.id/alasan-kapolri-nilai-pilkada-2018-lebih-aman-dari-pilgub-jakarta-cfZN>

³⁵ Fadhil, Haris. 2018. Polri Petakan 15 Daerah Rawan di Pilkada 2018. Online: dapat diakses: <https://news.detik.com/berita/d-3931871/polri-petakan-15-daerah-rawan-di-pilkada-2018>

tetapi, dari sekian potensi konflik yang muncul pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017, isu SARA dan kasus penistaan agama menjadi isu yang paling panas dan mempengaruhi pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Sedangkan potensi lain tidak menjadikan kekhawatiran berlebih dan tidak mempengaruhi keberlangsungan pilgub DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan pemungutan suara di pilgub DKI Jakarta berlangsung secara aman dan damai.

Sejalan dengan pendapat Thung Ju Lan *et al.* yang menyebutkan bahwa setidaknya ada beberapa kondisi utama yang berpotensi konflik, antara lain: distorsi kebijakan publik, patologi birokrasi, kesenjangan sosial ekonomi, perebutan sumber daya ekonomi, masalah identitas adat dan kebudayaan, masalah penegakan hukum dan keadilan *legal justice*, dan disfungsi aparat keamanan.³⁶ Untuk mengetahui potensi konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta, setidaknya dapat dilakukan beberapa hal, seperti deteksi konflik, pemetaan faktor, dan potensi konflik berdasarkan tahapan pelaksanaan pemilihan gubernur (sebelum, saat dan setelah pemungutan suara).

4.3.1.1 Deteksi Konflik

Untuk mengetahui potensi konflik yang ada pada suatu wilayah dan merencanakan upaya pencegahan dan penanganan konflik dapat diawali dengan deteksi konflik. Upaya pendeteksian potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dapat dilakukan dengan melakukan langkah deteksi konflik seperti profil wilayah, background konflik, bentuk konflik dan de-eskalasi konflik.

4.3.1.1.1 Profil wilayah.

Fauziah menyebutkan setidaknya ada tiga faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial di Jakarta, yaitu:

a) faktor internal (kepadatan penduduk, jumlah pengangguran, jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1, serta jumlah surat miskin yg dikeluarkan pemerintah); b) Faktor Fasilitas (jumlah pasar dan jumlah terminal. Dengan asumsi tempat ini menjadi tempat bertemu berbagai penduduk dg sosial ekonomi, budaya

³⁶ Thung Ju Lan et. al. 2011. Panduan Implementasi Kebijakan tentang Kerangka Kerja Pencegahan Konflik. Jakarta. Penerbit Penelitian Politik LIPI, hal. 22

*berbagai jenis latar belakang); c) Faktor eksternal (jumlah penduduk, dan jumlah penduduk pendatang).*³⁷

DKI Jakarta merupakan provinsi utama sekaligus ibu kota negara republik Indonesia. Jakarta menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, bisnis, pendidikan dan bilateral hubungan internasional. Oleh karena itu Jakarta menjadi pusat daya tarik setiap penduduk Indonesia untuk bisa hidup dan melanjutkan kehidupan di Jakarta.

Jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 tercatat berjumlah 10.374.235 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 0.94 persen. Sementara itu, tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2017 mencapai 15.663 jiwa per 1 km², dengan Jakarta Barat sebagai wilayah dengan kepadatan tertinggi dengan 19.516 jiwa/km² dan Kepulauan seribu sebagai wilayah dengan kepadatan terendah dengan 2.747 jiwa/km².

Jumlah penduduk Jakarta menandakan keanekaragaman suku bangsa dan budaya. Keanekaragaman itu ditandai dengan suku Betawi, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Ambon, Cina, dan Arab dapat hidup berdampingan di Jakarta. Oleh karena itu, mereka tetap mengakui identitas suku bangsa masing-masing, namun mereka membangun identitas baru bersama sebagai warga Jakarta. Selain suku bangsa, Jakarta dihuni oleh berbagai macam latar agama, sebagaimana tercatat dalam data pemerintah provinsi bahwa penduduk Jakarta yang beragama Islam 8,6 Juta, Kristen 888,8 ribu, Katholik 411,7 ribu, Budha 385,9 ribu, Hindu 19,4ribu, Konghucu 1.200, Aliran kepercayaan 226 jiwa.

Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin pada tahun 2017 tercatat 393.130 jiwa (3,78%) dari 10.374.200 jiwa jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2017. Ajaibnya, jumlah populasi ini berkontribusi mengontrol 60 persen perputaran uang di Indonesia.³⁸ Kota administrasi Jakarta Utara merupakan wilayah dengan penduduk miskin terbanyak yaitu sebesar 99,31 ribu orang sedangkan Kepulauan

³⁷ Fazriah, Siti. 2006. Wilayah Konflik di DKI Jakarta. Depok. Skripsi. Universitas Indonesia. Hal. 49

³⁸ Okamoto, Masaaki and Honna Jun. 2014. Introduction: Local Politics in Jakarta: Anomaly from Indonesia's Local Politics?. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 33, 1, hal. 3

Seribu merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit yaitu sebanyak 3,09 ribu orang. Selain jumlah penduduk miskin di Jakarta, tercatat juga jumlah angkatan kerja Jakarta sejumlah 7.795.714 jiwa dengan jumlah penduduk kerja Jakarta berjumlah 7.093.537 jiwa, dan 702.177 jiwa adalah pengangguran.

Sementara itu, capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan progres setiap tahunnya dan pencapaian pada tahun 2017 adalah 80.06 poin. Capaian pembangunan manusia DKI Jakarta ini merupakan yang sangat tinggi, dan menandakan DKI Jakarta sebagai wilayah yang sangat baik dalam pengembangan pembangunan manusia. Berdasarkan IPM wilayah di DKI Jakarta, tercatat bahwa wilayah paling tinggi IPM nya tahun 2017 sampai paling rendah yaitu, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.³⁹

Adanya ketimpangan ekonomi mengakibatkan jumlah penduduk miskin meningkat, ditambah tingginya jumlah pengangguran yang dibarengi kepadatan penduduk yang tinggi, akhirnya mengakibatkan terjadinya tindak kejahatan di masyarakat. Tercatat pada tahun 2017 terjadi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 8.647 kasus kejahatan, dengan rincian wilayah tingkat kriminalitas terbanyak Jakarta Barat (1.990 kasus), Jakarta Selatan (1.858 kasus), Jakarta Pusat (1.621 kasus), Jakarta Utara (1.564 kasus), Jakarta Timur (1.561 kasus), dan Kepulauan Seribu (53 kasus).

Latar belakang dan kenaekaragaman penduduk Jakarta menunjukkan persatuan dan kesatuan tidak berjalan mulus begitu saja. Jakarta menjadi saksi bisu terjadinya konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan politik, ideologi dan SARA, seperti peristiwa '65, Tanjung Priok, sampai dengan peristiwa '98. Tidak cukup sampai disana, kehidupan yang damai di Jakarta kembali digoyang oleh sentimen anti SARA di kalangan masyarakat oleh peristiwa politik dalam bentuk pemilihan gubernur. Tercatat pada pilgub DKI Jakarta

³⁹ BPS Republik Indonesia. "Data DKI Jakarta 2017 (Metode Baru)". Tersedia di: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/3100> (Diakses pada oktober 2018)

tahun 2012, sentimen SARA digunakan dalam barasi politik identitas untuk memenangkan persaingan politik Jakarta.

Sentimen ini digunakan untuk meramaikan pilgub DKI Jakarta saat itu yang mempertandingkan antara pasangan Fauzi Bowo-Nahrowi Ramli dengan Joko Widodo – Basuki Tjahja. Fauzi Bowo - Nahrowi merepresentasikan masyarakat Betawi (putra daerah) dan muslim, sedangkan Joko Widodo – Basuki Tjahja merepresentasikan pendatang dan etnis cina dan non muslim (untuk Basuki). Walaupun dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – Basuki Tjahja, keberjalanan pemerintahan tidak berjalan mulus dan bukan tanpa rintangan.

Lepas dari euphoria panas pertarungan pada pilgub tahun 2012, kondisi yang sama bahkan lebih panas kembali terulang di pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dimana isu SARA digunakan kembali dalam peta politik DKI Jakarta. Hal ini berbeda sekali dengan fakta bahwa DKI Jakarta selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2013-2015 mendapatkan indeks demokrasi Indonesia terbaik di Indonesia.

Namun pada tahun 2016 perolehan indeks demokrasi Indonesia provinsi DKI Jakarta mengalami penurunan 10 poin, hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan pilgub DKI Jakarta yang penuh ketegangan dan konflik. Bahkan, Bawaslu Republik Indonesia mengumumkan bahwa Jakarta mendapatkan indeks kerawanan pemilu dengan kategori sedang. Walaupun terkategori kerawanan sedang, Jakarta sebagai ibukota dan pusat pemerintahan memerlukan perhatian penuh karena posisi sentralnya sekaligus barometer politik Indonesia. Terlebih dalam pencapaian indeks demokrasinya ada beberapa dimensi yang mengkhawatirkan seperti dimensi kontestasi menyangkut variabel kampanye (terkait isu suku, agama, ras, dan golongan, serta fitnah dan hasutan) dan variabel konflik antar peserta pemilu yang rentan terjadi gesekan sosial antar pendukung di wilayah ibukota.⁴⁰

4.3.1.1.2 Latar Belakang konflik

Ketegangan perebutan kekuasaan di Jakarta sudah terjadi sejak pelaksanaan pilgub DKI 2014 silam, dimana pada putaran dua sudah

⁴⁰ Evaluasi pengawasan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2017. Bawaslu RI

terjadi polarisasi pemilih lebih tajam, antara pro islam dan tidak pro islam walaupun tidak sebesar pada pilgub 2017. Hal ini dikarenakan pasangan Fauzi bowo – Nahrowi Ramli pasangan muslim yang didukung oleh Demokrat, PAN, Hanura, PKB, PBB dan PKPI. Sedangkan Joko widodo – Basuki tjahja pasangan plural (muslim dan kristen) yang didukung oleh PDI Perjuangan dan Gerindra.

Isu sara berupa sentimen etnis dan agama digaugkan pada putaran kedua pilgub DKI tahun 2012 serta kekhawatiran masyarakat terhadap Joko Widodo meninggalkan DKI Jakarta untuk maju dalam pilpres dan menyerahkan kepemimpinan kepada Ahok yang notabennya adalah seorang kristen dan etnis tionghoa. Ketakutan masyarakat ini belajar pada sejarah Joko Widodo yang meninggalkan kota solo dan menyerahkan kepemimpinan solo pada wakilnya Felix yang beragama kristen. Akan tetapi sentimen tidak terlalu besar karena pasangan itu dikontrol oleh sosok Joko Widodo yang muslim dan dinilai berkerpiadian sangat merakyat serta berpengalaman, walaupun lawan pasangannya adalah petahana di DKI Jakarta.

Faktanya Setelah dilantik sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur, Joko Widodo dan Basuki Tjahja, kepemimpinan Basuki tidak terlalu sentral karena perhatian masyarakat berfokus pada gubernur. Selang dua tahun setelah dilantik, dan bertepatan dengan pilpres 2014, benar saja Joko Widodo melepaskan jabatan gubernur DKI Jakarta. Sesuai dengan ketentuan, maka Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Basuki selaku wakil gubernur. Namun, tidak lama dari pelantikan Basuki sebagai gubernur, pada 10 september 2014, Basuki melayangkan surat pengunduran diri dari kader partai Gerindra dan memilih tidak terikat dengan partai manapun. Strategi ini yang membuat pihak partai Gerindra merasa geram karena sikap itu dinilai khianat dan pragmatis.

Pada saat Basuki menjabat gubernur sebetulnya banyak gebrakan yang dilakukan antara lain lelang jabatan, *e-budgeting* dan *e-catalog*, penataan aset Pemprov DKI, pembangunan RPTRA sampai penertiban kawasan tanah abang dan kalijodo. Akan tetapi gebrakan positif yang dilakukan meninggalkan kegaduhan di masyarakat, mulai

dari kebijakan yang tidak sensitif konflik, gaya kepemimpinan yang keras dan tidak disukai oleh masyarakat, dugaan keterlibatan pada korupsi RS sumber waras sampai bentrok kekerasan di masyarakat korban penggusuran kawasan kalijodo dan luar batang dengan aparat. Hal ini membuat LIPI menyatakan bahwa kepemimpinan Basuki di Jakarta ini mengabaikan kemanusiaan. Hasilnya ada sebuah anomali dalam sebuah survei di masyarakat Jakarta, bahwa masyarakat Jakarta mayoritas merasa puas dengan kinerja Basuki – Djarot, namun tidak akan dipilih lagi dalam pilgub oleh masyarakat dengan berbagai alasan.

Kemudian pada akhir masa jabatan sebagai gubernur DKI Jakarta, Basuki dan Jarot kembali mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Maka, terpaan isu SARA kembali mengemuka dan sangat besar. Bahkan respon publik semakin membesar akibat ucapan Basuki di kepulauan seribu yang diduga mengandung unsur penistaan agama. Respon besar umat Islam ini dilakukan dengan cara yang massif dan terorganisir dari awal kejadian hingga penetapan vonis pidana bagi Basuki.

Hal ini ditunjukkan dalam bentuk aksi 411, 212 bahkan beberapa aksi pengawalan sidang tersangka Basuki Tjahja. Setelah Anies Baswedan – Sandiaga Uno dinyatakan oleh KPU sebagai pemenang pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dan kubu Basuki Tjahja Purnama – Djarot Syaiful Hidayat menerima keputusan itu dengan lapang dada dan tidak mengajukan sengketa, maka massa umat Islam semakin tenang dan menurun tensi ketegangan di akar rumput. Kemudian massa umat Islam penduduk Jakarta semakin turun tensi ketegangannya setelah pengadilan negeri Jakarta Utara memutuskan bahwa Basuki Tjahja Purnama dinyatakan bersalah melakukan tindakan penistaan agama dan divonis dua tahun kurungan penjara.

Selain isu SARA yang memanas dalam pelaksanaan pilgub DKI Jakarta, ada beberapa isu lain yang terjadi misalnya: masih terjadi politik uang berupa bagi-bagi sembako, permasalahan DPT, profesionalisme penyelenggara, kekhawatiran netralitas ASN dan permasalahan teknis lainnya.

4.3.1.1.3 Bentuk Konflik, Fase Eskalasi dan De-Eskalasi Konflik

Sejatinya proses kompetisi ini menjadi sumber konflik karena menciptakan ketegangan di masyarakat. Adapun bentuk konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang disertai fase eskalasi dan deeskalasi konflik dapat dilihat dengan menggunakan kurva konflik Ramsbotham⁴¹. Kurva konflik ini terdiri dari fase eskalasi dan deeskalasi serta indikatornya.

Tabel 4.6 Fase Konflik Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 Berdasarkan Ramsbotham Curve

Fase	Indikator	Aktivitas
Eskalasi	Perbedaan	Masyarakat DKI Jakarta hidup dengan karakteristik SARA masing-masing. Karakteristik itu diimplementasikan oleh pribadi dan kelompok sosial masing-masing dalam aktivitas di masyarakat. Hal ini terjadi akibat proses kategorisasi dan identifikasi dari identitas sosial yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Proses kategorisasi terjadi dalam bentuk kecenderungan mencari kesamaan identitas di masyarakat, baik suku, agama, pekerjaan dan lainnya. Adapun identifikasi mulai pada berkumpul dengan yang sekategori dan melakukan perkumpulan baik formal maupun informal berdasarkan kesamaan latar belakang tersebut. Misalnya, bergabung dengan FPI, FBR, Forkabi, Keluarga Sunda, Jawa dan lain sebagainya.
	Kontradiksi	Pelaksanaan kompetisi dalam Pemilihan gubernur, kelompok identitas masyarakat diaktivasi untuk meraih dukungan dan memenangkan persaingan. Akibatnya mulai muncul komparasi antar kelompok masyarakat, <i>in group out group</i> terjadi. Pada akhirnya muncul stereotipe dan prasangka yang diakibatkan identitas sosial yang terbentuk. Hal ini ditandai dengan munculnya kelompok yang lebih besar dan didasarkan kesamaan pilihan politik. Kelompok ini dapat berupa dukungan formal maupun non formal, seperti tim

⁴¹ Ramsbotham, Oliver et al. 2011. *Contemporary Conflict Resolution*. Cambridge: Polity press. Hal. 13

Fase	Indikator	Aktivitas
		<p>sukses atau partai pendukung pasangan calon, relawan pasangan calon masing-masing. Tiap kelompok berkeinginan memenangkan pasangan calonnya.</p> <p>Kontradiksi ini dipertegas dengan penggunaan simbol-simbol dukungan yang berbeda. Simbol dukungan tersebut menjadi pertanda bahwa calonnya lebih baik dari calon lainnya.</p>
	Polarisasi	<p>Masing-masing kubu pendukung menunjukkan sikap dukungannya secara terbuka di masyarakat dengan berbagai media. Kelompok dukungan itu semakin jelas basis dan kutub pilihan politiknya. Mana pendukung Agus – Sylvi, Basuki – Djarot, dan mana pendukung Anies – Sandi. Dukungan terbuka ini dilakukan di dunia nyata maupun media sosial. Selain itu mulai muncul beberapa istilah negatif yang mengasosiasikan pada kelompok tertentu, misal Cebong, Taplak, Cingkrang, Sumbu Pendek dan lain-lain. Selain itu terjadi <i>negatif dan balck campaign</i>. Polarisasi yang terbentuk pada pilgub DKI Jakarta mengakibatkan terjadinya tindakan diskriminasi.</p> <p>Polarisasi ini menguat dengan terjadinya beberapa gerakan umat islam dalam bentuk aksi bela islam yang menginginkan penahanan Basuki atas kasus penistaan agama. Kelompok Basuki – Djarot pun melakukan <i>counter act</i> dengan dukungan kepada Basuki dan kelompok lainnya menyerukan aksi kebangsaan dan dukung pluralitas Jakarta.</p>
	Kekerasan	<p>Terjadi beberapa kekerasan berupa <i>socioculture in community</i> selama pelaksanaan pilgub DKI Jakarta, antara lain: <i>Prejudice/enemy images, Racism, sexism</i> dan <i>religious intolerance</i>.</p> <p>Namun, kekerasan terbuka Hanya terjadi beberapa pada pelaksanaan pilgub saja dan itu pun hanya segelintir kecil kelompok masyarakat, seperti kasus yang terjadi di salah satu TPS di Gambir, Jakarta Pusat. Namun, kekerasan verbal terjadi impresi yang sangat besar di dunia maya dan media sosial. Dimana perdebatan</p>

Fase	Indikator	Aktivitas
		pendukung pasangan calon terjadi panas bahkan saling menjatuhkan dan tak jarang mengandung informasi fitnah, hoax atau <i>fake news</i> .
	Perang	Tahapan ini tidak sampai terjadi pada pilgub DKI Jakarta
De- eskalasi	Gencatan senjata	Persaingan pemilu ini berakhir di TPS masing-masing dan memenangkan pasangan masing-masing. Janji presiden selepas aksi 411 yang memastikan proses hukum yang transparan pada kasus yang menimpa Basuki menurunkan ketegangan yang terjadi. Selain itu, dari awal semua pasangan calon dan tim sukses sudah melakukan kesepakatan bersama untuk melakukan kampanye damai dan anti SARA. Pemerintah pusat, daerah, dibantu oleh aparat kepolisian dan TNI berkoordinasi dengan elit partai pendukung pasangan calon.
	Kesepakatan	Atas deklarasi damai tersebut, masing-masing kelompok saling menjaga diri untuk tidak melakukan tindakan kekerasan satu sama lain dan mengutamakan dukungan dan perlawanan secara santun. Begitu juga dalam hal proses hukum yang menjerat Basuki, semua kelompok menghargai proses hukum dan mengawalinya.
	Normalisasi	proses pemungutan suara Pilgub berjalan dengan lancar dan masing-masing calon legowo dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta. Pengadilan menetapkan Basuki Tjahja Purnama sebagai penista agama dan dijatuhi vonis 2 tahun penjara. Tuntutan utama massa umat islam selaku pihak korban telah terpenuhi. Kondisi Jakarta semakin mereda dan kondusif.
	Rekonsiliasi	Proses ini tetap berlangsung, gubernur terpilih mengakomodir semua pihak yang berselisih pada pilgub DKI Jakarta silam dalam program-programnya dan melibatkan semua secara bersama sebagai masyarakat Jakarta. Serta pemerintah provinsi terus mengkampanyekan semangat persatuan dan kerukunan antar umat beragama, suku dan budaya.

Setelah selesainya pilgub DKI Jakarta dan terpilihnya gubernur dan wakil gubernur, ditetapkanlah 18 isu strategis sebagai proses deeskalasi dalam bentuk RPJMD DKI Jakarta yang merupakan kombinasi antara janji kampanye, SDGs, RPJMN sampai RTRW 2030. Dari kebijakan yang dibuat, beberapa isu strategis disepakati sebagai upaya rekonsiliasi dari konflik yang pernah berkembang pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017, sehingga tidak berubah menjadi konflik laten. Isu yang mengakomodasi hal tersebut antara lain: pengendalian pemanfaatan ruang kota, ketimpangan ekonomi, pengangguran, kualitas pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan budaya multikultur.⁴²

4.3.1.2 Pemetaan Faktor

Selanjutnya dilakukan pemetaan faktor yang dapat menyebabkan konflik sosial di DKI Jakarta, termasuk di dalamnya konflik politik. Pemetaan konflik dapat dilakukan dengan menganalisis faktor struktural dan aktor sekuritisasi pada konflik. Hal ini sesuai dengan panduan CEWER Indonesia yang dikembangkan oleh ITP dan Bappenas bahwa pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara memetakan konflik yang terjadi dengan pendekatan analisis faktor struktural dan analisis aktor sekuritisasi.⁴³

4.3.1.2.1 Faktor Struktural Konflik

Atas dasar itu diketahui bahwa faktor struktural dan menjadi potensi pada konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017, antara lain:

4.3.1.2.1.1 Faktor Struktural

Secara struktural, potensi konflik yang timbul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah perebutan kekuasaan, pribadi dan kepemimpinan Basuki, serta ketidakadilan. Pada dasarnya faktor yang menjadi sumber terjadinya konflik pasti diawali dari kesenjangan dan ketidakadilan. Ketidakadilan dan kesenjangan yang terjadi di lapangan yang tidak diselesaikan maka akan berkembang menjadi

⁴² Bappeda Provinsi DKI Jakarta. 2018. RPJMD 2018-2022. Online: dapat diakses di: <https://Bappeda.Jakarta.Go.Id/Index.Php/Rpjmd/Front#Collapse4>

⁴³ Program peace Through Development dan Institut Titian Perdamaian. 2012. Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia. Jakarta: Peace Through development – BAPPENAS, hlm. 31

sebuah perlawanan dan konflik. Pertentangan ini tumbuh akibat prsangka di masyarakat.

Dalam hal perebutan kekuasaan sebagai sumber daya yang terbatas menjadi faktor mendasar terjadinya konflik. hal ini sejakan dengan pandangan dahrendorf bahwa sejatinya politik adalah konflik itu sendiri. Karena kekuasaan memiliki pengaruh yang besar namun hanya bisa diraih oleh kalangan terbatas, maka setiap kelompok akan berlomba-lomba melakukan berbagai strategi dalam merebut sumber daya terbatas itu demi kelangsungan kepentingan mereka.

Pilgub DKI Jakarta ini akan berujung pada kekuasaan yang merupakan sumber daya yang terbatas dan diperebutkan oleh banyak pihak yang berkepentingan. Dahrendorf mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan satu aktor dalam suatu hubungan sosial akan berada dalam posisi melakukan perlawanan tanpa melihat dari kemungkinan perlawanan itu menyerah.⁴⁴

Isu sara yang berkembang di DKI Jakarta tahun 2017 merupakan pewarisan dari pilgub DKI Jakarta sebelumnya terutama putaran kedua yang murni sebagai alat politik demi mendapatkan dukungan dengan strategi politik identitas. Pasangan Joko widodo – Basuki Tjahja direpresentasikan sebagai etnis Jawa, cina, pendatang dan kristen. Sedangkan pasangan Fauzi bowo - Nahrowi ramli direpresentasikan sebagai etnis betawi, muslim dan pribumi. Akan tetapi pada akhirnya masyarakat memilih Joko Widodo – Basuki Tjahja sebagai pemenang pada pilgub DKI Jakarta yang melambangkan sosok pro rakyat dan dekat dengan kaum marjinal.

Tapi, peta dukungan partai politik dan masyarakat berubah dengan etika politik dan gaya kepemimpinan gubernur pengganti Basuki Tjahja, setelah DKI Jakarta ditinggalkan oleh Joko Widodo yang terpilih sebagai presiden Indonesia. Basuki Tjahja melakukan keputusan yang mengejutkan Partai Gerindra sebagai partai

⁴⁴ Dahrendorf dalam Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media, hlm. 55

pengusungnya, dengan keluar sebagai kader Gerindra. Adapun gaya kepemimpinan, Basuki yang tegas, keras, kasar dan mementingkan progress menjadi antitesa gaya Jokowi yang dikenal blusukan, santun, dekat dengan rakyat miskin. Gaya kepemimpinan itu tidak bisa diterima oleh mayoritas penduduk DKI Jakarta.

Selain itu, ditambah banyak kebijakan yang dilakukan oleh Basuki yang mendapat penilaian buruk, seperti penggusuran, rotasi ASN, transformasi budaya kerja, dugaan kasus korupsi, sampai reklamasi. Kebijakan tersebut mengorbankan masyarakat miskin ibu kota dan dirasa menghilangkan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia. Hal ini diperkuat dengan rilis LBH Jakarta (13/4/2017) tentang pelanggaran HAM dalam penggusuran di Jakarta tahun 2016 menyebutkan rekor dipecahkan kepemimpinan Basuki Tjahja sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan 25.533 korban penggusuran. Rincian korban penggusuran paksa ini 193 kasus, 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.⁴⁵ Penggusuran ini dilakukan antara lain kawasan kumuh Bukit Duri, Kampung Pulo, Pluit, Luar Batang dan lainnya.

Penolakan terhadap Basuki tidak hanya dilakukan oleh masyarakat miskin saja, kalangan ASN Jakarta pun menunjukkannya. Hal itu disampaikan Basuki dalam sebuah konferensi pers yang mengatakan bahwa dia yakin kalau ASN Jakarta tidak akan mendukung Basuki jika saya maju di Pilgub 2017 karena kepemimpinan Basuki keras terhadap mereka, dan Basuki mengakui mengantongi datanya.

Isu sara itu kembali muncul dan memanas setelah ada keinginan Basuki Tjahja secara terbuka untuk maju kembali pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Masyarakat Jakarta sudah mulai membangun *prejudice* dan diskriminatif tentang etnis dan agama terhadap Basuki. Namun isu sara tersebut tidak besar berpengaruh besar awalnya dikarenakan banyak masyarakat Jakarta merasa puas dengan kinerja

⁴⁵ Sari, Nursita. 2017. LBH Jakarta: Ahok Mungkin Pecahkan Rekor Penggusuran oleh Pemrov DKI. Online. Dapat diakses di: www.megapolitan.kompas.com/read/2017/04/13/13405181/lbh.jakarta.ahok.mungkin.pecahkan.rekor.penggusuran.oleh.pemprov.dki

pemerintahan Basuki Tjahja – Djarot (sekitar 72% menurut riset SMRC) namun mayoritas tidak ingin memilih pasangan itu kembali di pilgub mendatang.

Kondisi tersebut didukung hasil survey yang dilakukan indoProgress untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap isu-isu SARA yang saat itu sering ditemui, dan menunjukkan potensi konflik akibat isu SARA dalam kampanye Pilgub DKI 2017 tapi tidak besar.⁴⁶ Rincian hasilnya adalah sekitar 29% responden yakin bahwa masyarakat DKI Jakarta bisa terbelah oleh isu-isu SARA; sedangkan yang menentang keyakinan ini adalah sebanyak 59%, dan sisanya, sebanyak 10 %, adalah ragu-ragu.

Survei indoStrategi ini menggambarkan bahwa masyarakat ibu kota ternyata memiliki kecenderungan untuk menjaga hubungan baik antara sesama warga dan tidak mudah terprovokasi oleh isu SARA yang kerap menimbulkan konflik, sekaligus membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat DKI Jakarta sebagai masyarakat yang menjunjung perbedaan etnik, agama dan ras. Namun DKI Jakarta yang heterogen dan multikultur, ternyata rentan terhadap konflik dan budaya kekerasan. Susan (2009) menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia masih tergolong *vulnerable society* (masyarakat rentan) hal itu disebabkan salah satunya karena tingginya segregasi sosial, serta rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi.⁴⁷

4.3.1.2.1.2 Faktor Triger

Faktor triger yang menjadi sumber terjadinya konflik pada pilgub DKI Jakarta adalah isu SARA dan Respon Basuki Tjahja yang menistakan agama. Isu sara sebagai bagian strategi politik identitas ini sudah dilakukan sejak pilgub DKI Jakarta tahun 2012 dan diulangi kembali pada pilgub DKI Jakarta kali ini. Marcus Mietzner, peneliti ANU

⁴⁶ Mtq. 2016. IndoStrategi Ungkap Potensi Konflik Sosial Pilkada 2017. Online. Dapat diakses di: <https://www.swarasenayan.com/indostrategi-ungkap-potensi-konflik-sosial-pilkada-2017/> dan Saputra, Ari. 2016. Potensi Konflik Pilkada DKI Jakarta. Online. Dapat Diakses di: https://news.detik.com/foto-news/d-3207192/potensi-konflik-pilkada-dki-jakarta/4#share_top. Survei yang dilakukan oleh lembaga survei indostrategi ini dilakukan pada 1-12 April 2016 dengan melibatkan 1200 responden yang dipilih secara acak di empat kota dan satu kabupaten di Provinsi DKI Jakarta.

⁴⁷ Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu konflik kontemporer. Jakarta: Prenada Media. Hal. 2

Australia, menegaskan bahwa isu agama dan politik identitas sudah lama digunakan dalam pemilu Indonesia. Dalam potret Jakarta, isu ini sudah muncul sejak pilgub tahun 2012. walaupun tidak besar isunya dikarenakan Ahok berposisi sebagai wakil.

Kenyataannya menurut riset Mietzner, bahwa peta politik warga Jakarta adalah 40% pemilih konservatif, 35% pemilih plural dan sisanya *swing voters*. Massa inilah yang terpengaruh dengan isu penistaan agama dan gaya kepemimpinan Ahok. Akhirnya isu sara dan respon yang menjadi viral ini, menyebabkan kemarahan umat Islam kepada Basuki Tjahja dan melakukan gerakan mobilisasi massa yang dikomandoi oleh tokoh agama Islam seperti Habib Rizieq dan lain-lain. Isu penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja (gubernur petahana sekaligus calon gubernur pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017) pada akhirnya digunakan sebagai modal bagi politik identitas agar Basuki dan Djarot tidak terpilih dan Basuki ditangkap.

Berdasarkan survei Indoproggress pada April 2016 disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Jakarta adalah masyarakat multikultur yang menjunjung perbedaan etnik, agama dan ras. Tapi keadaan itu berubah cepat akibat peristiwa pernyataan Basuki Tjahja Purnama tanggal (30/9/2016) pada sebuah agenda kunjungan di kepulauan seribu yang dianggap melakukan penistaan agama, sebagai bentuk respon atas isu sara yang mulai panas dihembuskan oleh lawan politik Basuki Tjahja. Pernyataan tersebut direkam dan viral di media massa, media sosial dan dunia maya, dan akhirnya menimbulkan gerakan besar di kalangan internal umat Islam dan menghimpun opini politik bahwa Basuki Tjahja alias Ahok adalah penista agama.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan divisi hukum Mabes Polri, Brigjen Pol. Bambang Usadi yang menetapkan DKI Jakarta sebagai daerah paling rawan konflik pada pilkada serentak 2017. Dia menyatakan bahwa isu SARA dikembangkan setelah terjadinya polemik pada peristiwa yang disangkakan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahja. Selain itu, dia meyakini ada upaya politisasi yang dilakukan elit politik pada gerakan mobilisasi massa 411 yang berujung pada dugaan makar.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan fenomena cukup banyaknya pemilih non rasional di Jakarta yang memilih bukan hanya karena kinerja tapi ada faktor lain yang bersifat emosional, individual, penilaian negatif dan lain-lain. *Swing voters* ini sangat mementingkan perubahan yang terjadi di masyarakat baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini dapat diketahui dari hasil riset LSI Denny JA yang menjelaskan bahwa 56,1% warga tidak memilih calon penista agama, selebihnya menjawab pilih calon penista agama 20%, dan sisanya tidak tahu dan tidak menjawab.

Adapun terkait dengan ketidaksukaan masyarakat terhadap pribadi dan gaya kepemimpinan Basuki bagaikan bom waktu yang menunggu tiba waktu ledakan. Pribadi yang santun dan gaya kepemimpinan yang diterima oleh semua kalangan tidak menjadi modal politik bagi Basuki Tjahja. Hal ini sejalan dengan analisis dari Ian Wilson dari Murdoch University bahwa kekalahan Ahok (Basuki) pada pilgub adalah ketidaksukaan rakyat kecil kepemimpinan Ahok yang beda dari kepemimpinan Jokowi. Terbukti dari gaya bicara dan pengusuran yg dilakukan sewenang-wenang. Walaupun sebagian besar masyarakat mengatakan kinerjanya bagus, namun sikapnya yang ceplas-ceplos, mengakibatkan kasus penistaan agama semakin mencuat dan jadi triger. FPI masuk melakukan advokasi mewakili masyarakat bawah, karena mereka ada di kantung masyarakat bawah.⁴⁸

Hasil riset LSI Denny JA diperkuat dengan hasil survey yang dilakukan oleh median membuktikan alasan pemilih non rasional tidak memilih Basuki Tjahja, antara lain: tidak suka Ahok karena Ahok tidak bisa menjaga kata-kata (28%), Ahok penista agama (10.7%), Ahok pribadi yang arogan (9,3%) dan Ahok non muslim (5,7%).⁴⁹

4.3.1.2.1.3 Faktor Akselerator

⁴⁸ Hidayat, Avit. 2017. Penyebab Ahok Kalah versi Dua Peneliti Australia. Online. Dapat diakses di: <http://www.pilkada.tempo.co/amp/868728/penyebab-ahok-kalah-versi-dua-peneliti-australia>. Bahkan, catatan catatan ian, kurang lebih 50 ribu warga Jakarta jd korban gusuran Ahok.

⁴⁹ Mashabi, Sania. 2017. Survei: Ahok dianggap paling kompeten, tapi warga ogah memilih. Online. Dapat diakses di: <http://merdeka.com/amp/politik/survei-ahok-dianggap-paling-kompeten-tapi-warga-ogah-memilih.html>

Faktor pendorong yang dilakukan secara terus menerus dan dilakukan berulang, dan terkait dengan isu utama pilgub DKI Jakarta akan menjadi akselerator konflik. Akselerator konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah isu sara, kampanye (*negative* dan *black campaign*) di media sosial dan demonstrasi masyarakat (umat islam) atas Basuki Tjahja Purnama. Hal ini dilakukan karena petahana harus bertanggungjawab atas permasalahan penistaan agama yang dilakukannya beberapa waktu lalu. Terbukti kasus penistaan agama menjadi hal paling berpengaruh yang memanaskan situasi pilgub DKI Jakarta karena ditandai dengan mobilisasi massa yang konsisten dilakukan oleh umat islam.

Tercatat tujuh gerakan dan demonstrasi yang dilakukan oleh umat islam (dinamakan aksi bela islam) sejak kasus penistaan agama yang dilakukan oleh basuki tjahja dilaporkan ke kepolisian sampai keputusan sidang pengadilan negeri jakarta utara berupa vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pada 9 mei 2017. Tujuh aksi itu antara`lain: Aksi 1410 (dimotori oleh habib riziq), Aksi 411 (Habib Riziq pimpin aksi di depan istana dan ahirnya bertemu dg wiranto dan Jusuf Kalla kemudian pada malam hari presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa kasus penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahja harus ditindaklanjuti secara transparan), Aksi 212 (agenda ibadah bersama, doa untuk Indonesia dan dihadiri oleh Presiden), Aksi 112 (komando Forum Umat Islam (FUI) dan GNPFMUI, namun hanya berlangsung di Istiqlal), Aksi 212 jilid 2, Aksi 313 (massa aksi melakukan longmarch dari masjid Istiqlal – istana merdeka), dan ditutup dengan aksi 55 sebagai penutup pada saat dibacakan tuntutan pengadilan atas basuki Tjahja Purnama.

Selain aksi massa di lapangan, panasnya kampanye dengan tema dan bahasan isu sara di dunia maya dan media sosial pun mempengaruhi konflik pilgub DKI Jakarta. Tercatat Satu fenomena besar pada pelaksanaan Pilgub DKI tahun 2017 adalah penggunaan internet dan media sosial sebagai alat kampanye oleh masyarakat baik dalam bentuk *positive campaign*, *negative campaign* maupun *black campaign*. Hal ini menjadi keniscayaan bahwa internet dan media

sosial menjadi alternatif media kampanye yang murah namun berdampak besar terutama pada pemilih pemula atau milenial Jakarta. Hal ini didukung oleh fakta bahwa pengakses internet dan pengguna media sosial di Indonesia masuk dalam yang terbesar di dunia.

Berdasarkan data survey kominfo tercatat terdapat 143,26 juta jiwa pengguna internet pada tahun 2017 di Indonesia, dengan komposisi usia pengguna internet dan media digital menunjukkan masyarakat berumur 19-34 sebesar 49.52 % namun untuk penetrasi terbesar berumur 13-18 sebesar 75.50 %.⁵⁰ Data tersebut diperkuat dengan temuan Markplus Insight, bahwa jumlah pengguna internet Indonesia didominasi oleh generasi muda berusia 15-30 tahun yang disebut “netizen”.

Pengaruh fenomena media sosial dan internet yang besar berdampak pula pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Aktivitas kampanye pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 terjadi hubungan yang resiprokal antara dunia nyata dan dunia maya. Aktivitas di media sosial tak jarang berujung pada ketegangan, polarisasi dan kekerasan baik di dunia maya (dalam bentuk *hashtag war*, *twit war*, *comment war* dan lain-lain) yang erat kaitannya dengan isu SARA, *hoax* dan *fake news* yang menyerang hampir semua kontestan. Polarisasi dan ketegangan yang diakibatkan sumber politik nampaknya tidak hanya terjadi pada pilgub DKI 2017 saja bahkan sudah jauh terjadi sejak Pilgub DKI Jakarta tahun 2012. Hal ini dapat dibuktikan dengan kesamaan profil dan strategi kontestasi di media sosial pada tiap tahun pemilu.

Akibat yang ditimbulkan oleh isu SARA di dunia maya pada pilgub DKI Jakarta termanifestasi di dunia nyata. Terbukti di lapangan terjadi beberapa kejadian yang diakibatkan perkembangan isu sara di masyarakat seperti kejadian penolakan untuk menyolatkan muslim

⁵⁰ Siaran Pers NO. 53/HM/KOMINFO/02/2018 tentang Jumlah Pengguna Internet 2017 Meningkat, Kominfo Terus Lakukan Percepatan Pembangunan Broadband. Online. Dapat diakses di: https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/12640/siaran-pers-no-53hmkominfo022018-tentang-jumlah-pengguna-internet-2017-meningkat-kominfo-terus-lakukan-percepatan-pembangunan-broadband/0/siaran_pers

pendukung pasangan basuki, kampanye negatif di majelis taklim atau forum masyarakat, dan berbagai aksi bela islam yang terjadi.

Panasnya pertarungan di dunia maya tidak hanya melibatkan masyarakat DKI Jakarta saja, tapi masyarakat seluruh dunia saat itu juga dapat berpartisipasi menjadi partisipan yang terlibat dalam kampanye dan peperangan di dunia maya. Sulitnya pemantauan yang dapat dilakukan, diperparah dengan fenomena akun palsu, akun ganda bahkan akun robot pada media sosial. Hal ini menambah kompleks kompetisi pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Politicawave merilis terjadi 14.603.893 percakapan dan 2.258.354 netizen membicarakan pilgub DKI Jakarta. Ahok - Djarot mendapat sentimen positif (+54,92%, - 45,08%) dibanding Anies Sandi (+44,54%, -55.46%). Sentimen positif Ahok Djarot : dukungan netizen dalam persidangan, dukungan relawan Agus-Sylvi dan komunitas, dukungan Parpol Islam, dan penampilan debat. Sentimen negatif: penistaan agama dan proses persidangan, desakan Gubernur non aktif, aksi 212 dan 313, kalah di beberapa survei. Sentimen positif Anies Sandi: dukungan ormas dan komunitas, dukungan Pan dan Perindo, penghentian reklamaasi, dan program kerja. Negatif: kritik program kerja, dugaan beberapa kasus hukum, dugaan kampanye sara.⁵¹

Tercatat beberapa *trending topic* dan cuitan pada Twitter Indonesia pada pelaksanaan putaran kedua pilgub DKI Jakarta dalam laporan liputan6.com, antara lain: #PilkadaDKI, Anies-Sandi, DP 0, Nyoblos Tanpa Rusuh. Selain itu, percakapan dunia maya di Jakarta tentang Ahok-Djarot sebesar 61.04 persen dan Anies-Sandi 38,96 persen.⁵²

Besarnya aktivitas media sosial berbanding lurus dengan besarnya *traffic* pada internet dan penyedia jasa operator selular di Indonesia terutama Jakarta. Operator XL misalnya mencatat terjadi kenaikan trafik sampai 10% pada hari pencoblosan. Dan media sosial

⁵¹ Ayu, Maya. 2017. Pilkada DKI: politicawave, Ahok Djarot Unggul di Media Sosial. Dapat diakses di: www.pilkada.tempo.co/amp/866368/pilkada-dki-politica-wave-ahok-djarot-unggul-di-media-sosial (diakses pada oktober 2018)

⁵² Hidayat, Muhammad Wahyu. 2017. Di Medsos Pendukung Ahok Dominan, Anies Unggul Jumlah Pemilih. Online. Dapat diakses di: www.m.liputan6.com/amp/2925648/di-medsos-pendukung-ahok-dominan-anies-unggul-jumlah-pemilih (diakses pada oktober 2018)

yang paling ramai trafiknya menurut Bambang Parikesit (*Vice President* XL area Jabodetabek), adalah *instagram, facebook, twiter, line, dan Path*, sedangkan *instant messenger* terjadi pada *whastapp*.⁵³

4.3.1.2.2 Agen Sekuritisasi

Setelah diketahui faktor strukturalnya, kemudian diketahui aktor sekuritisasi pada konflik di pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Adapun aktor sekuritisasi ini terdiri dari:

4.3.1.2.2.1 Agen Sekuritisasi

Agen sekuritisasi adalah aktor utama yang bisa mempengaruhi kelompok untuk melakukan tindakan darurat guna merespon ancaman keamanan eksistensial. Misalnya, tokoh politik, agama, adat, pemuda, komunitas dan lain-lain. Dengan penanganan yang tepat, Aktor Sekuritisasi juga mampu menjadi kekuatan pencegah konflik dan pembendung terjadinya konflik.

Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, agen sekuritisasi antara lain: Presiden Joko Widodo, Pasangan calon, Pimpinan partai pengusung, Habib Riziq, tim sukses, pimpinan relawan, tokoh masyarakat, tokoh ormas dan tokoh agama.

4.3.1.2.2.2 Aktor Fungsional

Aktor Fungsional merupakan pihak yang mempengaruhi hubungan dinamis antara Aktor Sekuritisasi dengan kelompok rentan, misalnya media massa. Misal, kelompok politik, agama, adat, pemuda, LSM, profesional, akademisi.

Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, agen sekuritisasi antara lain: Pemerintah Daerah, Kepolisian, KPU, bawaslu, pengawas independen, relawan demokrasi, akademisi, dan pihak lain yang tidak mendukung politik identitas.

4.3.1.2.2.3 Kelompok Rentan

Kelompok Rentan adalah kelompok atau kumpulan orang yang dianggap oleh aktor sekuritisasi sebagai rentan terhadap ancaman

⁵³ Wix.co.id. [traffic-medsos-melonjak-saat-pilkada-di-dki-jakarta-putaran-kedua](http://www.wix.co.id/traffic-medsos-melonjak-saat-pilkada-di-dki-jakarta-putaran-kedua). Tersedia di: www.mix.co.id/marcomm/brand-communication/traffic-medsos-melonjak-saat-pilkada-di-dki-jakarta-putaran-kedua (diakses pada oktober 2018)

keamanan eksistensial. Misal, kelompok politik, agama, masyarakat/etnis, pemuda atau pengangguran. Pada kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, kelompok rentan ini antara lain: umat muslim, etnis lokal atau pribumi, etnis tionghoa, korban ketidakadilan, kelompok miskin, dan pengangguran.

Penanganan kelompok rentan dilakukan agar kelompok masyarakat ini tidak menjadi korban konflik atau pemicu konflik, bahkan didukung menjadi aktor yang membangun perdamaian. Contoh upaya yang dapat dilakukan misal pembentukan organisasi masyarakat untuk mencegah konflik atau menciptakan kegiatan sederhana tapi mempertemukan pihak yang dapat berkonflik dan beraktifitas sukacita bersama.

Pemilihan umum sebagai pengenalan politik demokratis dapat dengan mudah digunakan sebagai instrumen memobilisasi etnis, mengubah pemilihan umum menjadi konflik “kami” melawan “mereka”.⁵⁴ Dalam konteks rangkaian demokrasi, tahun 2019 Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan presiden sekaligus pemilihan legislatif. Maka dari itu, konflik yang pernah terjadi beserta potensi yang terdeteksi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 harus menjadi perhatian baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Sejatinya demokrasi merupakan upaya penyelesaian konflik namun di saat yang bersamaan dapat menciptakan konflik itu sendiri.

Terlebih penduduk Jakarta menunjukkan penduduk dengan tingkat literasi politik dan partisipasi demokrasi yang cukup baik, sebagaimana partisipasi saat pilgub yang mencapai 77%. Dari segi jumlah pemilih pun, DPT Jakarta tergolong cukup besar yaitu sebanyak 7.211.891 Pemilih atau 3.9% dari total DPT nasional sebanyak 185.732.093 pemilih.⁵⁵ Partisipasi pemilih pada pemilu dan menjadi anggota partai ini merupakan salah satu bentuk kegiatan partisipasi politik menurut Budiarjo.⁵⁶ Pemilih pada pilpres dan pileg ini terdiri dari pemilih yang relatif sama dengan pemilih pada pilgub DKI Jakarta, baik komposisi maupun karakteristiknya.

⁵⁴ Haris, Peter dan Ben reily. 2000. *Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator*. Depok: Aamepro. Hal. 19

⁵⁵ kpu.go.id

⁵⁶ Budiarjo, Miriam.2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hal.367

Selain itu, peran media pun sangat berpengaruh dalam demokrasi di Indonesia saat ini, baik media *mainstream* maupun media sosial. Media massa sebagai pilar demokrasi keempat menjadi salah satu tolak ukur perkembangan demokrasi di Indonesia. Media massa menjadi pilar demokrasi sebagai alat kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, dan terlepas dari sistem politik formal, eksekutif, legislatif dan yudikatif. Kematangan politik dan literasi politik yang cukup baik pada pemilih Jakarta menjadikan media massa dan media sosial dapat mempengaruhi preferensi politik mereka. Akses media yang mudah dan cepat selain dapat menjadi edukasi demokrasi (transparansi dan akuntabilitas) namun dapat menjadi pemicu konflik.

Opini yang terjadi dan dibangun di Jakarta dapat sangat cepat menyebar dan mempengaruhi wilayah lainnya. Maka, jika opini dan konten media negatif, seperti hoax dan *black campaign*, tidak terdeteksi dan dicegah sejak dini, maka dapat menimbulkan konflik besar dan dapat mengganggu stabilitas keamanan dan demokrasi di Jakarta menjelang pemilihan presiden dan legislatif tahun 2019. Sejatinya, demokrasi memberi ruang terwujudnya kebebasan individu, mengurangi kekerasan dan stabilitas negara.⁵⁷

Menjaga stabilitas demokrasi akan sangat berkaitan dengan menjaga stabilitas keamanan. Pendeteksian potensi yang dapat membantu dan mengganggu stabilitas demokrasi harus dilakukan demi terjadinya stabilitas keamanan kawasan, dalam hal ini Jakarta sebagai ibukota negara. Sejalan dengan pendapat Comte dalam Susan, bahwa jika potensi konflik dapat dikelola dengan baik sejatinya ia mengembalikan masyarakat damai tanpa mereduksi kemerdekaan berpolitik.⁵⁸ Berdasarkan pembahasan mengenai potensi konflik yang terjadi pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, maka potensi konflik dalam konteks rangkaian pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tercatat antara lain:

4.3.1.3 Potensi Konflik Sebelum Pemungutan Suara

Pada fase pra pemungutan suara ini terjadi beberapa potensi konflik. Potensi konflik ini dilatar belakangi dengan berbagai faktor penyebab. Potensi yang muncul pada fase ini antara lain:

⁵⁷ KPU Kabupaten Ponorogo. -. Pilkada dan Politik Uang. Online. Tersedia di: [https://kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada_dan_Politik_Uang_\(KPU_Kabupaten_Ponorogo\).pdf](https://kpu.go.id/koleksigambar/Pilkada_dan_Politik_Uang_(KPU_Kabupaten_Ponorogo).pdf). Diakses pada 8 Januari 2019

⁵⁸ Susan, Novri. 2009. Sosiologi Konflik dan isu-isu Kontemporer. Jakarta: Kencana. Hal. 28

ketidaksukaan dan penolakan kepemimpinan Basuki, isu SARA dan penistaan agama, demonstrasi massa penjarakan Ahok, sampai *money politic* dan kampanye negatif dan hitam di dunia maya dan nyata.

Tercatat pada fase pra pemungutan suara, semua potensi itu muncul dan termanifestasikan pada di permukaan. Misalnya, ketidaksukaan terhadap personal dan kepemimpinan Basuki, banyak masyarakat membenarkan hal ini terbukti dalam beberapa jajak pendapat (sejak februari 2016) dihasilkan masyarakat tidak menyukai gaya kepemimpinan Basuki (Ahok) yang terlihat kasar, *serampangan* dalam berkomunikasi, dan tidak menjadi pemimpin yang teladan sebagaimana disampaikan oleh Eep Saepulloh dari polmark dalam sebuah wawancara.⁵⁹ Adapun isu SARA dan penistaan agama, muncul sejak memasuki masa kontestasi pilgub DKI Jakarta dimana terdapat tiga pasang calon yang akan berkompetisi di pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Tendensi itu memuncak dengan respon yang dilakukan oleh Basuki dalam sebuah kegiatan di Kepulauan Seribu pada 30 september 2016 dan menjadi viral sehingga menimbulkan respon yang besar di masyarakat.

4.3.1.4 Potensi Konflik Saat Pemungutan Suara

Pada fase pemungutan suara, potensi konflik yang muncul antara lain: profesionalisme penyelenggara pemilu, DPT ganda, penyalahgunaan surat pemilih milik orang lain, pemilih yang tidak tercatat di DPT, penggunaan DPTb palus, dan gangguan pelaksanaan penyelenggaran pemungutan suara. Potensi ini termanifestasikan ke dalam beberapa kejadian di lapangan.

Potensi konflik pada pemungutan putaran pertama, terjadi keramaian di berbagai TPS masyarakat yang tidak masuk dalam DPT yang ditetapkan oleh KPUD Provinsi DKI Jakarta yang diakibatkan oleh banyak masyarakat belum melakukan perekaman penduduk dengan berbagai alasan salah satunya terjadi di TPS 88 dan 89 Cengkareng

⁵⁹ Zen RS. 2017. "Eep Saefulloh Fatah: Saya Tidak Mengkapitalisasi Sentimen SARA". Dalam: <https://tirto.id/saya-tidak-mengkapitalisasi-sentimen-sara-cso6> (diakses pada 10 November 2018)

Barat, yang terdapat di rusunawa Marunda.⁶⁰ Sehingga hal ini berimbas pada membludaknya pemilih yang menggunakan form DPTb yang terbatas, dan hasilnya banyak pemilih yang tidak dapat menunaikan hak pilihnya dikarenakan tidak dapat mengakses surat suara yang terbatas di TPS karena tidak sesuai dengan perencanaan.

Potensi yang diakibatkan profesionalisme dan penyelenggaraan pemilu juga terjadi di lapangan, tepatnya di TPS 17 di kawasan Petamburan Jakarta Barat dimana terjadi ketegangan antara warga dan ketua KPPS yang disebabkan kinerja panitia dan penguasaan aturan pemilu yang tidak jelas.⁶¹ Adapun permasalahan pemilih ganda dan pemalsuan identitas pemilih juga terjadi di lapangan dengan tertangkapnya satu orang yang menggunakan hak pilih tidak sesuai dengan identitas pemilihnya dan diproses tindak pidana pemilu.

4.3.1.5 Potensi Konflik Setelah Pemungutan Suara

Pada fase pasca pemungutan suara, potensi konflik yang muncul biasanya terkait kekecewaan terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu, serta ketidakpuasan terhadap kinerja penyelenggara pemilu. dan kekerasan yang diakibatkan kekecewaan terhadap hasil pemilu. Namun pada pelaksanaannya, semua pihak bersikap dewasa dan legowo menerima hasil pemilihan umum dan proses hukum yang menjerat.

Hal ini diwujudkan dengan konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan Basuki – Djarot yang mengakui kekalahan dengan berguyon dan tetap ceria mengucapkan selamat kepada pasangan terpilih Anies – Sandi, dan meminta para pendukungnya bersikap dewasa dan mendukung sepenuhnya pemimpin Jakarta terpilih.⁶² Adapun terkait

⁶⁰Tashandra, Nabilla. "Sumarsono: Pilkada Serentak 2017, DPT Pilkada DKI Paling Bermasalah". Dalam:

<https://nasional.kompas.com/read/2017/03/07/15425971/sumarsono.pilkada.serentak.2017.dpt.pilkada.dki.paling.bermasalah>. (diakses pada 10 November 2018). Yusuf, Yan. "Karut Marut DPT Pilgub DKI, KPU Langgar Konstitusi Warga". Dalam: <https://metro.sindonews.com/read/1180977/171/karut-marut-dpt-pilgub-dki-kpu-langgar-konstitusi-warga-1487339577> (diakses pada 10 November 2018)

⁶¹ BBC Indonesia. "Pilkada DKI: Kisruh di TPS Rizieq Shihab, Ketua PPS sempat diusir". Dalam: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39638093> (Diakses pada 12 Oktober 2017)

⁶² Aziza, Kurnia. 2017. Berguyon dan Legawa, Cara Ahok-Djarot Terima Kekalahan. Diakses di: <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/04/20/09043481/berguyon.dan.legawa.cara.ahok-djarot.terima.kekalahan>

proses hukum yang mengait dirinya, Basuki Tjahja mengaku mengikuti proses hukum yang ada dan meminta para loyalis dan pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan yang negatif dan kekerasan kepada siapapun.

Namun masih terjadi berbagai demonstrasi massa dari berbagai kelompok seperti FPI, FUI dan GNPF MUI. Aksi dilakukan untuk mengawal proses hukum yang menjerat Basuki dan memastikan vonis dijatuhkan kepada Basuki.

4.3.2 Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017

Peran Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan Konflik di DKI Jakarta adalah sebuah keharusan untuk menjaga stabilitas sosial, politik dan ekonomi di wilayah pemerintahannya yang diakibatkan oleh sebuah peristiwa konflik. Terlebih konflik yang terjadi adalah di wilayah ibukota negara, yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi. Tidak hanya Undang-undang No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial menjadi landasan hukum, namun juga harus tetap menyesuaikan hukum lainnya yang terkait dengan teknis pemilihan umum, seperti Undang-undang Pemilu, Undang-undang tentang pemilihan gubernur dan aturan hukum lainnya.

Dalam hal pencegahan, penanganan dan penyelesaian konflik di daerah, pemerintah memberikan porsi peran yang besar kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur selaku kepala daerah, termasuk di dalamnya konflik politik (pemilihan gubernur). Pencegahan konflik adalah serangkaian kegiatan yang menyangkut peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini. Pencegahan konflik adalah strategi yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan menciptakan kondisi yang stabil dan dapat memprediksi lingkungan keamanan internasional.⁶³ Kebijakan pencegahan konflik ini dilandasi oleh berbagai sistemik politik dan faktor birokrasi.

Program pencegahan pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 yang dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik antara lain: a) pelaksanaan rencana aksi

⁶³ Carment, David, dan Martin Fischer. 2011). Handbook of ethnic conflict (Karl, Cordell dan Steffan Wolff) Routledge: New York.

tim terpadu penanganan konflik sosial; b) deteksi dini konflik; c) pemetaan dan pendeteksian wilayah konflik di Jakarta; d) melakukan pendidikan politik kepada masyarakat (menghimbau masyarakat menjunjung demokrasi yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu sara); d) koordinasi dengan forum binaan bakesbangpol; dan e) pembentukan pos komando bersama pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Program pencegahan yang dilakukan itu merupakan upaya meredam potensi konflik yang muncul pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 seperti: a) isu SARA dan penistaan agama, b) perebutan kekuasaan dan politik; c) penyelenggaraan pemilu; d) petahana dan netralitas ASN.

Peran pencegahan konflik yang dilakukan Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta dapat disusun berdasarkan rangkaian pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017, antara lain:

4.3.2.1 Pencegahan Konflik Sebelum Pemungutan Suara

Berdasarkan potensi konflik yang muncul pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017, badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol) provinsi DKI Jakarta merespon dengan melakukan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk mendeteksi potensi konflik sampai melakukan pencegahan terjadinya konflik pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Upaya pendeteksian dan pencegahan itu termanifestasikan dalam berbagai bentuk kegiatan baik dilaksanakan oleh bakesbangpol maupun melakukan sinergi dengan berbagai *stakeholder* terkait.

Upaya yang dilakukan bakesbangpol dan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam pencegahan konflik pada pilgub DKI Jakarta, berjalan dengan baik sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah sebagai *leading sector* terhadap penanganan konflik sosial di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 6 Undang-undang Nomor 7 tahun 2012, bahwa proses pencegahan konflik dapat dilakukan dengan cara: a) memelihara kondisi damai dalam masyarakat; b) mengembangkan

sistem penyelesaian perselisihan secara damai; c) meredam potensi Konflik; dan d) Membangun sistem peringatan dini.⁶⁴

Amanat tersebut diimplementasikan dalam pembentukan posko bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 dalam Pembentukan posko bersama ini dilandasi dengan keputusan gubernur nomor 125 tahun 2017 tentang Pembentukan Pos Komando (Posko) Bersama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017. Posko bersama yang dibentuk ini terdiri dari posko bersama tingkat provinsi sampai kelurahan. Hal ini dilakukan agar pemantauan pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ini berjalan dengan lancar. Posko bersama ini melakukan koordinasi dan konsolidasi baik bulanan maupun insidental sesuai dengan tahapan pemilu.

Upaya pemetaan dan deteksi dini potensi konflik menjadi hal yang mutlak dilakukan dalam upaya pencegahan konflik. Sebagaimana kita ketahui bahwa pencegahan konflik disusun oleh upaya deteksi dini, peringatan dini dan tanggap dini. Bakesbangpol provinsi DKI Jakarta pun melakukan program pemetaan dan deteksi dini potensi konflik. Program pemetaan dan deteksi ini diimplementasikan dalam rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dan sistem pencegahan konflik. Output dari program ini adalah sistem pencegahan terintegrasi dan dokumen terkait profil potensi konflik yang ada di DKI Jakarta. Namun program tersebut hanya sampai tahun 2015 saja dan tidak dilanjutkan dikarenakan permasalahan anggaran. Adapun kaitannya pilgub DKI Jakarta, bakesbangpol berkoordinasi dengan Bawaslu dan Kepolisian yang melakukan pemetaan kerawanan pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta.

Upaya pencegahan langsung di masyarakat tentang pentingnya demokrasi yang santun dan anti SARA, bakesbangpol melakukan pendidikan politik kepada berbagai kelompok masyarakat. Sebagaimana terjadi di lapangan banyak terjadi kasus penolakan pasangan calon untuk melakukan kampanye ke masyarakat. Penyampaian pendidikan politik ini berisi himbauan pada masyarakat untuk menjunjung demokrasi

⁶⁴ Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan konflik Sosial, Pasal 6

yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu sara, serta mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Pendidikan politik ini dilakukan dalam bentuk seminar, sosialisasi, diskusi publik dan koordinasi dengan aparat kelurahan untuk mencegah terjadinya gesekan di masyarakat. Selain itu, dalam penanganan demonstrasi penistaan agama seperti aksi 411 dan 212, bakesbangpol bersama TNI Polri senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan kelompok pendemo terkait massa dan tuntutan serta memberikan layanan fasilitas demonstrasi seperti tempat asprasi dan lain sebagainya.

Bakesbangpol pun melakukan koordinasi dengan forum-forum dibawah pembinaan bakesbangpol seperti: FKDM, FKUB dan lain-lain. Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) lahir sebagai amanat dari kemendagri untuk pemerintah daerah dan diisi oleh masyarakat sipil mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan. FKDM ini berfungsi sebagai mata dan telinga pemerintah untuk senantiasa membantu pemerintah dalam membangun kewaspadaan dini di masyarakat. Selain itu, FKDM dan Forum lainnya digunakan oleh bakesbangpol sebagai garda terdepan dalam upaya deteksi dini dan cegah dini dalam rangka pencegahan konflik di DKI Jakarta.

FKDM Provinsi DKI Jakarta masih belum menemukan pola komunikasi dan strategi kerja organisasi yang tepat. Hal ini diakui oleh bakesbangpol bahwa mekanisme organisasi untuk FKDM diserahkan kepada forum tersebut, bakesbangpol hanya memberikan contoh teknik koordinasi dan pelaporan. Selama ini koordinasi yang dilakukan berupa bimtek tahunan, rapat koordinasi triwulan, laporan tertulis tiap bulannya, dan laporan *real time* di grup pada aplikasi *instant messenger* yang dihuni oleh perwakilan bakesbangpol dan anggota FKDM provinsi DKI Jakarta.

Terkait isu SARA dan penistaan agama, bakesbangpol berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka penegakan hukum yang menjerat salah satu peserta pilgub DKI Jakarta. Namun tetap menghargai proses hukum dan pemilu yang sedang dijalani oleh tersangka dengan memberi kesempatan menyelesaikan rangkaian pemilu dan tetap mengkondisikan masyarakat agar tetap kondusif

melalui aparat pemerintah di tingkat kelurahan. Isu SARA tidak dapat dilepaskan dari politik di Indonesia dikarenakan masuknya SARA dalam politik dapat dilihat dari dua kondisi, yaitu karena alamiah/natural (*given*) dan karena sesuatu yang bersifat direkayasa (*by design*) (Bawaslu RI, 2017).⁶⁵ Maka dari itu, upaya pencegahan terhadap konflik yang diakibatkan isu SARA harus dilakukan sedini mungkin karena dua kemungkinan ini ada dan tidak dapat dilepaskan.

Proses pemilu sebagai ajang legal perebutan kekuasaan dan politik di Jakarta, bakesbangpol memantau KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu agar senantiasa memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siapapun baik diusung partai maupun independen untuk maju dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Pemantauan bakesbangpol terhadap penyelenggara pemilu tidak berhenti pada proses pendaftaran saja, namun tetap dilakukan sampai kampanye, pemungutan suara dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Pemantauan dan koordinasi antar elemen ini merupakan i'tikad baik dari semua pihak demi terlaksananya penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta yang sehat, aman, damai dan lancar, sejak awal hingga akhir.

Selain itu potensi konflik yang dikhawatirkan selanjutnya adalah netralitas aparat sipil negara. Keberadaan petahanan sebagai *incumbent* dalam pilgub DKI Jakarta tahun 2017 memang menjadi perhatian penting dimana sering terjadi konflik di beberapa pemilihan daerah yang diakibatkan oleh netralitas aparat sipil negara. Akan tetapi sejauh ini tidak ditemukan kasus aparat sipil negara di Jakarta yang tertangkap tidak netral dalam pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Hal ini terjadi karena tingkat kematangan berpolitik masyarakat Jakarta yang semakin baik, sehingga partisipasi dan pengawasan masyarakat mempersempit gerak aparat sipil negara untuk tidak netral selain ancaman hukuman yang diberikan pemerintah daerah bagi ASN yang tidak netral sebagaimana disampaikan oleh plt gubernur DKI Jakarta Sumarsono. Peran kesbangpol memang tidak terasa langsung disini, namun sebagai think tank pemerintah bidang politik dan persatuan

⁶⁵ Bawaslu RI. 2017. Potensi Penggunaan Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018. Jakarta. Bawaslu RI

bangsa, tentunya kesbangpol senantiasa memberikan masukan dan gagasan dalam kebijakan.

4.3.2.2 Pencegahan Konflik Saat Pemungutan Suara

Selain potensi isu sara, dalam pelaksanaan pilgub DKI Jakarta tahun 2017 ada potensi lain yang menimbulkan konflik pada penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta. Misalnya saja masih terjadinya *money politic*, penyelenggara pemilu yang kurang profesional, kualitas pemilu di masyarakat, dan kesiapan penyelenggara. Terkait dengan potensi lain itu, Bakesbangpol memiliki peran yang sentral. Peran sentral tersebut ditunjukkan dalam keberadaan bakesbangpol sebagai pemimpin dalam struktur posko bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta yang di dalamnya terdapat penyelenggara pemilu.

Bakesbangpol tidak memiliki kebijakan langsung dalam pengerahan anggota, maka bakesbangpol berkoordinasi dengan KPUD, Bawaslu DKI Jakarta, Kepolisian dan Kejaksaan untuk menindaklanjuti secara langsung permasalahan pelaksanaan pemilihan umum yang termasuk tindak pidana dan non pidana di lapangan. Pada akhirnya di rapat koordinasi, bakesbangpol menyampaikan kepada penyelenggara pemilu dengan informasi yang masuk ke bakesbangpol terkait dengan pelaksanaan pemilu dan meminta *progres report* pemantauan dan penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Bakesbangpol terlihat tidak memiliki sistem operasional pencegahan konflik yang ideal dan terintegrasi. Padahal, operasional dari pencegahan konflik adalah terbentuknya kerangka kerja pencegahan konflik atau *conflict prevention framework*. *Conflict prevention framework* (CPF) adalah sebuah kerangka kerja yang disusun sebagai strategi struktural dan profesional dengan acuan jangka pendek, menengah dan panjang.⁶⁶

4.3.2.3 Pencegahan Konflik Setelah Pemungutan Suara

Strategi pencegahan konflik dapat berupa kerangka regulasi dalam rangka upaya pencegahan konflik jangka panjang seperti regulasi

⁶⁶ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2011. P2P LIPI kunjungi komisi 1 DPR RI. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/berita/p2p-lipi-kunjungi-komisi-i/5783>

mengenai kebijakan dan strategi pembangunan yang sensitif terhadap konflik dan upaya untuk tidak terjadinya konflik.⁶⁷ sejauh ini regulasi penanganan konflik sosial terpusat pada Undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, dan berbagai aturan turunan lainnya seperti permendagri tentang kewaspadaan dini di daerah dan lain-lain.

Terlebih ketegangan pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 tidak berhenti pada proses pemungutan suara. Akan tetapi, terus dipelihara dalam berbagai aksi demonstrasi massa yang dipimpin oleh pimpinan FPI, FUI maupun GNPF MUI sampai tercapainya keinginan sebagian besar masyarakat muslim di Jakarta agar perkara Basuki Tjahja diputuskan sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Maka dari itu, Bakesbangpol terus berkoordinasi kepada instansi terkait lainnya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih besar.

Selain itu, sebagaimana tujuan pencegahan konflik menurut Undang-undang nomor 7 tahun 2012 adalah untuk menjaga kondisi damai di masyarakat. Pemilihan gubernur DKI Jakarta tidak dapat dipandang sebelah mata. Ketegangan yang diakibatkan oleh persaingan dan politik identitas, menciptakan dampak berkepanjangan dalam kehidupan sosial dan politik pada masyarakat Jakarta.

Keadaan ini menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah tugas bakesbangpol untuk menciptakan iklim masyarakat yang bersatu dan damai dengan latar belakang apapun. Pekerjaan rumah tentang intoleransi, prejudice, dan diskriminasi antar masyarakat suku bangsa dan agama, yang harus diresolusi segera agar tidak menjadi konflik yang besar di kemudian hari. Oleh karena itu, badan kesatuan bangsa dan politik sudah mulai melakukan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi ketegangan dari pilgub DKI Jakarta silam kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti seminar bela negara bagi OKP, kegiatan kebhinekaan bagi FKUB dan lain sebagainya.

⁶⁷ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2015. Laporan Akademik II kerangka Pencegahan konflik di Indonesia. Online. Tersedia di: <http://lipi.go.id/publikasi/-laporan-akademik-ii-kerangka-pencegahan-konflik-di-indonesia/14712>

Lain dari pada itu, dikarenakan objek peristiwa pilgub ini terjadi di ibukota negara, maka harus dijaga kedamaian dan stabilitas keamanannya. Karena kondisi ini menjadi pertarungan Indonesia di mata dunia. Jakarta tidak hanya ibu kota negara, tapi juga pusat pemerintahan, bisnis, birokrasi, dan diplomasi internasional. Semua negara yang memiliki hubungan diplomatik dan investasi dengan Indonesia menitipkan warga dan konsulatnya di Jakarta.

Oleh karena itu, pemerintah pusat memutuskan untuk ikut andil mengamankan ibu kota. Pemerintah pusat melalui TNI/POLRI menerapkan kondisi waspada untuk zona ibukota. Pengamanan dilakukan sebagai bentuk kebijakan keamanan nasional dari ancaman yang datang dari dalam dan luar, baik dalam bentuk ancaman militer maupun non militer. Pengamanan yang dilakukan adalah bentuk implementasi Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI yang di dalamnya terdapat fungsi OMSP (operasi Militer Selain Perang).⁶⁸ Fungsi OMSP yang dilakukan selama pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dalam bentuk mengamankan objek vital negara, dan membantu tugas pemerintah daerah dan kepolisian dalam pengamanan pelaksanaan pemilihan umum mulai dari TPS hingga pengumuman yang dilakukan oleh KPU atau KPUD.

Selain itu, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proses politik berupa pemilihan gubernur di Indonesia, termasuk di dalamnya DKI Jakarta sebagai bentuk menjaga keamanan nasional dan melaksanakan amanat kemanusiaan. Hal ini sejalan pendapat Supriyatno, bahwa dalam konsep keamanan nasional, terdapat empat dimensi: dimensi pertahanan negara, dimensi stabilitas dalam negeri, dimensi ketertiban publik, dan dimensi keamanan insani.⁶⁹ *Human security* terfokus pada tujuh wilayah yaitu: keamanan ekonomi (*economic security*), makanan (*food security*), kesehatan (*health*

⁶⁸ Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

⁶⁹ Supriyatno, Makmur. 2014. Tentang ilmu Pertahanan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 44

security), lingkungan (*environmental security*), individu (*personal security*), komunitas (*community security*) dan politik (*political security*).⁷⁰

Selain itu, melihat semakain terkikisnya semangat kebersamaan, persatuan kesatuan dan toleransi antar umat beragama, antar etnis, dan antar suku di masyarakat Jakarta, seharusnya menjadi perhatian penting pemerintah dalam mengelola negara. Hal ini penting dikarenakan keanekaragaman yang dimiliki dapat menjadi peluang namun juga dapat menjadi ancaman jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan yang buruk terhadap keanekaragaman masyarakat Indonesia terutama di Jakarta, dapat membahayakan keamanan nasional Indonesia.

Pada akhirnya Bakesbangpol dituntut untuk merealisasikan suatu sistem pencegahan dan penanganan konflik terpadu dan terintegrasi, yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan bersinergi dengan *stakeholder* terkait di lapangan. Khususnya berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan umum sebagai proses demokrasi dan politik di Indonesia, karena pada tahun 2019 Indonesia akan menghadapi pesta demokrasi berupa pemilihan umum serentak baik presiden, wakil presiden dan legislatif.

Pembahasan di atas menjelaskan peran Bakesbangpol mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam setting agenda pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Peran yang dilakukan oleh bakesbangpol provinsi DKI Jakarta ditunjukkan dalam program-program pencegahan konflik di DKI Jakarta selama pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya implementasi dari tugas pokok dan fungsi bakesbangpol.

Peraturan gubernur DKI Jakarta Nomor 258 tahun 2016 mencatat ada 14 (empat belas) tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada bakesbangpol. Namun, dalam konteks penanganan dan pencegahan konflik pada pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017, dapat diketahui bahwa hanya ada beberapa tupoksi yang bersinggungan antara lain:

⁷⁰ Susetyo, Heru. Menuju Paradigma Keamanan Komprehensif Berperspektif Keamanan Manusia dalam Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Lex Journalica* Vol. 6 No.1, Desember 2008, hlm. 4

Pertama, Penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengordinasian program pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi;

Kedua, Fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa serta politik dan demokrasi; fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.;

Ketiga, Fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik, antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya masyarakat dan/atau antar organisasi lainnya;

Keempat, Pemantauan, pengkajian dan evaluasi persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat beragama serta ketahanan ekonomi dan seni budaya; dan

Kelima, Pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan pengembangan data dan informasi mengenai persatuan dan kesatuan bangsa, politik serta demokrasi.

Keseluruhan tugas pokok dan fungsi di atas diaplikasikan dalam berbagai program dan kegiatan antara lain: penyelenggaraan pendidikan politik bagi masyarakat Jakarta, himbuan kepada bakesbangpol yang ada di wilayah kotamadya dan forum binaan bakesbangpol untuk senantiasa menjaga kondusifitas sosial politik di Jakarta, membantu KPU dalam memastikan DPT, bahkan mengkoordinir semua elemen yang terlibat dalam pilgub dalam posko bersama.

Adapun kegiatan deteksi dan waspada dini dalam pencegahan konflik yang terjadi pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 dilakukan dalam bentuk aktivasi intelejen sipil/ FKDM, pendataan wilayah rawan konflik, koordinasi dengan partai politik dan tim sukses masing-masing pasangan calon, konsolidasi dengan unsur forkopimda, serta aktivasi kominda DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sejalan dengan misi yang diemban oleh bakesbangpol provinsi DKI Jakarta.

Tabel 4.7 Potensi Konflik dan Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Pencegahan Konflik pada Pilgub DKI Jakarta Tahun 2017

	Sebelum Pemungutan Suara	Saat Pemungutan Suara	Setelah Pemungutan Suara
Potensi Konflik	Ketidaksukaan dan penolakan kepemimpinan Basuki, isu SARA dan penistaan agama, demonstrasi massa penjarakan Ahok (Aksi Bela Islam), <i>money politic</i> dan kampanye negatif dan hitam di dunia maya dan nyata.	Profesionalisme penyelenggara pemilu, terjadi DPT ganda, pemilih yang tidak tercatat di DPT, penggunaan DPTb palsu, gangguan pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara.	Potensi konflik yang muncul biasanya kecewa pada kinerja penyelenggara pemilu, proses penyelenggaraan pemilu dan hasil pemilu. Fakta di lapangan tidak terjadi, semua pihak bersikap dewasa dan legowo menerima hasil pemilihan umum dan proses hukum yang menjerat salah satu calon.
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan posko bersama pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. • Membuat rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dan sistem pencegahan konflik sebagai program pemetaan dan deteksi dini potensi konflik. • Bakesbangpol berkoordinasi dengan 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai leader pada posko bersama, bakesbangpol menyampaikan kepada penyelenggara pemilu terkait pelaksanaan pemilu dan meminta <i>progres report</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi demonstrasi terus dilakukan sampai tercapainya dengan tuntutan agar perkara Basuki Tjahja diputuskan sebagai terdakwa kasus penistaan agama. Maka dari itu, Bakesbangpol terus berkoordinasi kepada

	Sebelum Pemungutan Suara	Saat Pemungutan Suara	Setelah Pemungutan Suara
Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<p>Bawaslu dan Kepolisian yang melakukan pemetaan kerawanan pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, berisi himbauan untuk menjunjung demokrasi yang sehat dan terhindar dari hoaks dan isu SARA, serta mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. • Bakesbangpol bersama TNI Polri berkoordinasi dengan pimpinan kelompok pendemo aksi 411 dan 212 dan lain-lain terkait massa dan tuntutan, disertai memberikan fasilitas demonstrasi seperti tempat asprasi dan lain sebagainya. • Bakesbangpol melakukan koordinasi dengan forum binaan bakesbangpol seperti: FKDM, FKUB dan lain-lain. • Bakesbangpol berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan dalam rangka 	<p>pemantauan dan penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bakesbangpol terus berkoordinasi kepada instansi terkait lainnya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih besar. 	<p>instansi kepolisian dan pengadilan lainnya agar tidak terjadi eskalasi konflik yang lebih besar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Badan kesatuan bangsa dan politik melakukan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengurangi ketegangan dari pilgub DKI Jakarta silam kepada berbagai lapisan masyarakat, seperti seminar bela negara bagi OKP, kegiatan kebhinekaan bagi FKUB dan lain sebagainya.

	Sebelum Pemungutan Suara	Saat Pemungutan Suara	Setelah Pemungutan Suara
	<p>penegakan hukum yang menjerat salah satu peserta pilgub DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Memastikan netralitas aparatur sipil negara DKI Jakarta terjaga.		